

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPUASAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE**

TESIS

**RUSTAM
46161030**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWAMAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Petani Di Ponre-Ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone**
2. Nama Mahasiswa : **Rustam**
3. NIM : **4616103030**
4. Program Studi : **Magister Administrasi Publik**

UNIVERSITAS
BOSOWA
Menyetujui,

Komisi Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Andi Rasvid Pananrangi, M. Pd.

Dr. Umar Congge, S. Sos., M.Si.

Mengetahui:

Direktor Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.

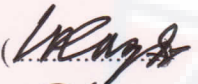
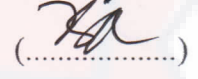
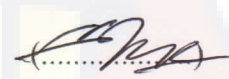
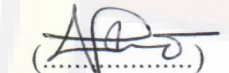
Prof. Dr. H. Andi Rasvid Pananrangi, SH., M.Pd.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : .
Tesis atas nama : Rustam
NIM : 4616103030
Judul Tesis : Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam
Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Petani Di
Ponre-Ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

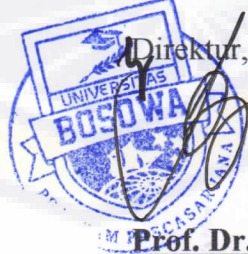
Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN TESIS

KETUA : Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, M. Pd. (.....) 
SEKERTARIS : Dr. Umar Congge, S. Sos., M. Si. (.....) 
Anggota Penguji : 1. Dr. Uddin B. Sore, S. Ip., S. H., M. Si. (.....) 
2. Dr. Nurkaidah, M. M. (.....) 

Makassar, 2018

Direktur,



Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,
Mahasiswa,

2018



Rustam
RUSTAM

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul **"Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Petani Di Ponre-Ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone"** dapat terselesaikan tepat waktu.

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai:

- 1) Operasi jaringan irigasi; dan 2) Pemeliharaan jaringan irigasi.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Ir. H M Saleh Pallu, M.Eng, yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan tesis ini sampai dapat dipertahankan didepan dewan penguji.
2. Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.. dan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, S.H., M.Pd. yang selama ini telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ketua Komisi Pembimbing Prod. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, M. Pd. dan anggota Komisi Pembimbing Dr. Umar Congge, S. Sos., M. Si. yang selalu memberikan dorongan dan koreksi-koreksi sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah mentransfer ilmunya dalam proses perkuliahan.

5. Seluruh informan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan informasinya di lokasi penelitian.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun, agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

**Makassar,
Penulis**

2018

BOSOWA

RUSTAM

ABSTRAK

Rustam. **Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Petani Di Ponre-Ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.** (Dibimbing oleh H. Andi Rasyid Pananrangi dan Umar Congge).

Permasalahan pada penelitian ini adalah mengenai operasi jaringan irigasi yang dilakukan untuk petani di Ponre-ponre Kabupaten Bone, dan jenis pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan di Ponre-ponre Kabupaten Bone.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-kualitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampel* (sampel bersyarat) yang mana informan tersebut kita tentukan yang disesuaikan dengan tema penelitian. Adapun informan ini terdiri atas kepala dinas, sekertaris dinas, kepala bagian, dan staf khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Operasi Jaringan Irigasi, dimana Sistem kerja pengaturan irigasi telah ditentukan oleh pemerintah. Pengaliran ke petak-petak sawah dilakukan saat musim tanam tiba khususnya saat musim pancaroba dan krisis air. Pihak dinas telah menunjuk pegawai untuk melakukan buku tutup jaringan irigasi yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas tanam petani apalagi saat musim kemarau tiba. Pengairan dilakukan minimal 2 minggu sekali atau tergantung dari keadaan sawah petani. Sedangkan rencana tanam telah dilakukan pada awal masa tanam yakni pada awal musim penghujan, pengaturan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kekurangan air di musim kemarau, jenis tanaman yang ditanam pun beragam tergantung dari musim dan keinginan petani. 2. Pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan mendapatkan bantuan dari warga sekitar jaringan irigasi Ponre-ponre. Bentuk pemeliharaan jaringan dilakukan dari hal terkecil misalnya pembersihan jalur irigasi, perbaikan kerusakan dalam skala kecil sedangkan perbaikan skala besar dilakukan dengan mengusulkan rencana perbaikan ke pemerintah pusat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan, Irigasi

ABSTRACT

The problem in this research is based on the research objectives which consist of: to find out the operation of irrigation networks and maintenance of irrigation networks in.

The type of research used is descriptive-qualitative. The informants in this study were determined by using purposive samples (conditional samples) in which we identified the informants according to the research theme. The informant consisted of the head of the service, the official secretary of the department, the section head, and the special staff.

The results of this study are: 1. Irrigation Network Operations, where the irrigation regulation work system has been determined by the government. Flowing into rice fields is done when the planting season arrives, especially during the transition season and water crisis. The agency has appointed employees to do a book cover on the irrigation network which is intended to maintain the quality of the planting of farmers, especially when the dry season arrives. Irrigation is carried out at least every two weeks or depends on the condition of the farmer's rice field. While planting plans have been carried out at the beginning of the planting period, namely at the beginning of the rainy season, this arrangement is intended to overcome the problem of water shortages in the dry season, the types of plants planted vary depending on the season and the wishes of the farmers. 2. Maintenance of irrigation networks is carried out by obtaining assistance from residents around the Ponre-Ponre irrigation network. The form of network maintenance is done from the smallest things such as cleaning the irrigation path, repairing damage on a small scale while large-scale improvements are carried out by proposing improvement plans to the central government.

Keywords: Optimization, Management, Irrigation

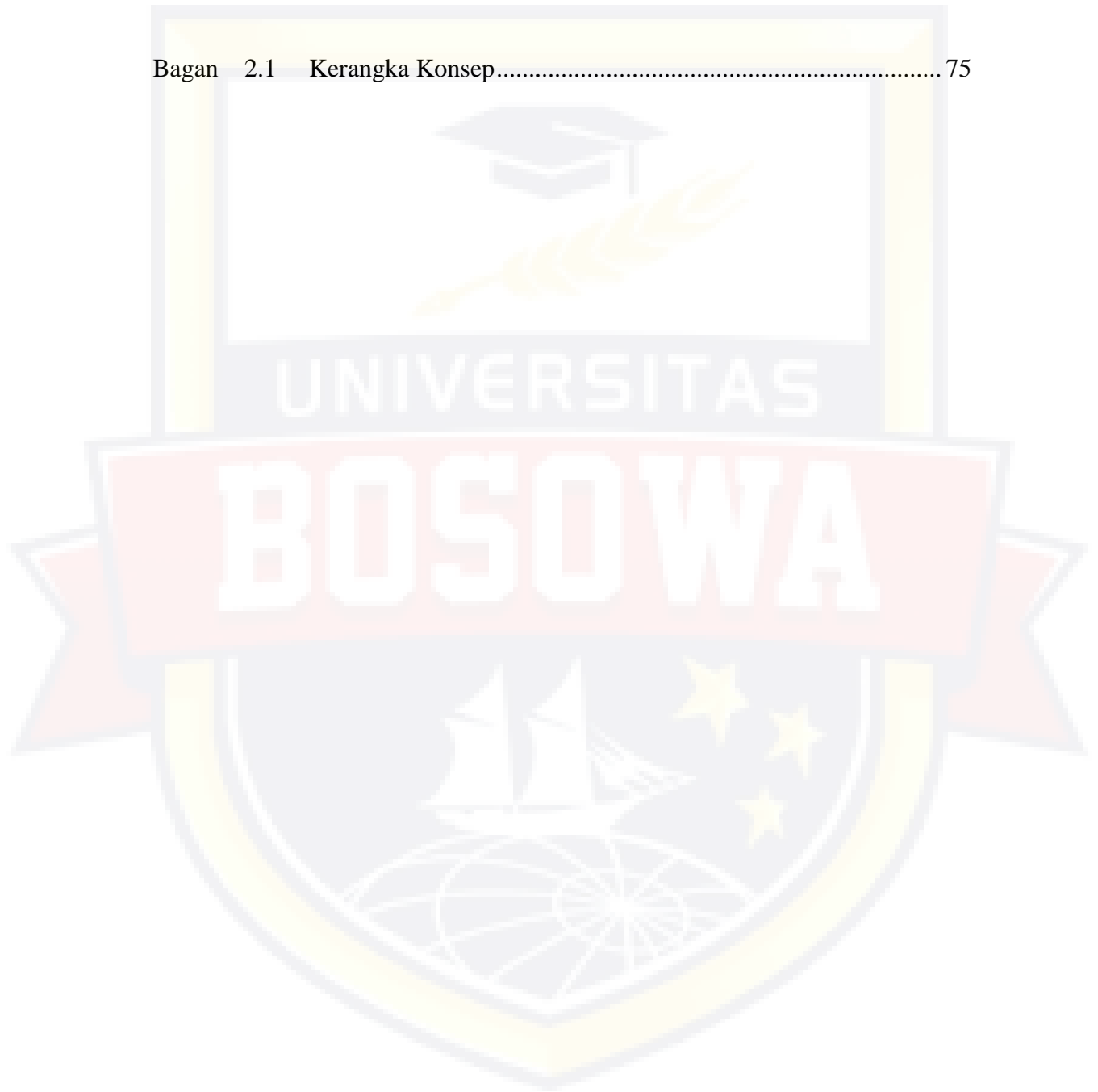
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRA.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Lingkup Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Deskripsi Teori	8
1. Konsep Optimalisasi	8
2. Konsep Pengelolaan.....	9
3. Konsep Air.....	13
4. Status Pengembangan Sumber Daya Air di Indonesia	17
5. Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia	23
6. Kinerja Pelayanan Air.....	37
7. Konsep Kepuasan Masyarakat.....	68
B. Penelitian Terdahulu	72

C. Kerangka Konsep.....	74
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	76
B. Lokasi Penelitian.....	76
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian	77
D. Sampel Data Penelitian	77
E. Instrumen Penelitian.....	78
F. Jenis dan Sumber Data.....	78
G. Teknik Pengumpulan Data.....	78
H. Teknik Analisis Data.....	79
I. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	81
J. Defenisi Operasional.....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Bone	82
B. Temuan Penelitian.....	88
1. Operasi Jaringan Irigasi.....	88
2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi	91
C. Pembahasan Hasil Penelitian	97
1. Operasi Jaringan Irigasi.....	97
2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Konsep.....	75
--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Bukti Penelitian	117
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	118
Lampiran 3 Foto-Foto	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan air bagi kehidupan di bumi sangatlah penting, bukan untuk aktivitas manusia melainkan proses pertumbuhan hewan dan tanaman, sehingga sangat tergantung terhadap keberadaan air. Namun keberadaan air dari satu tempat dengan tempat yang lain mempunyai perbedaan, karena proses siklus Hidrologi yang terjadi pada air terbagi ke berbagai daerah secara tidak merata menurut geografi maupun musim. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia sudah pasti kebutuhan air juga akan semakin meningkat pula, pemanfaatan yang sangat bervariasi terhadap keperluan air, juga akan memerlukan kebutuhan air yang cukup tinggi. Untuk keperluan rumah tangga, industri dan pertanian Kebutuhan air untuk pertanian akan menjadi penting, melihat kondisi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat karena secara tidak langsung kebutuhan makanan pokok penduduk juga mengalami peningkatan. Dalam hal ini mayoritas, makanan pokok penduduk Indonesia ialah beras, secara tidak langsung peningkatan produksi tanaman padi harus optimal.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan salah satu wujud dari pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, sesuai dengan amanat dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peranan sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, pengembangan

dan pengelolaan sistem irigasi, yang merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pengembangan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis.

Kebijakan pengelolaan sistem perlu diterapkan karena adanya, perubahan tujuan pengembangan pertanian dari meningkatkan produksi untuk Swasembada pangan menjadi bahan utama ketahanan pangan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi dan ketetapan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dalam hal Kebijakan Pengembangan dan Pengelolahan Sistem Irigasi menurut PP No 20 Tahun 2006 yaitu:

1. Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menejemen keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna untuk irigasi.
2. Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk Irigasi yang terdiri atas hak guna pakai air, dan hak guna usaha air untuk Irigasi.
3. Pengembangan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang meliputi instansi pemerintah P4A (Pemberdaya Perkumpulan Petani Pemakai Air).

Belakangan ini dunia tentang air, untuk pertanian telah berkembang, terbukti dengan adanya bangunan-bangunan air untuk irigasi. Dengan sistem ini berarti irigasi tergantung pada sungai dan waduk. Sehingga musim kemarau debit air sungai dan waduk berkurang. Air permukaan pada musim kemarau tidak mencukupi untuk mengairi daerah persawahan. Maka air untuk irigasi ini pun berkurang, untuk mengatasi kekurangan air irigasi tersebut, untuk mencukupi hasil pertanian lebih teratur maka masalah utama yang dihadapi ialah mengusahakan tambahan air irigasi. Cara mendapatkan air dengan cepat dan mudah,

sederhanaialah dengan menggunakan air tanah. dengan berbagai cara masyarakat berusaha untuk mendapatkan air tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya.

Dalam pengelolaan air di suatu daerah irigasi, kenyataannya seringkali terdapat pembagian air yang kurang sesuai kebutuhan air di petak-petak sawah. Pada petak yang dekat dengan *Intake* cenderung mendapatkan air yang berlebihan, sedangkan pada petak yang jauh dengan bangunan pengambilan utama cenderung kekurangan air. Usaha untuk meningkatkan produktifitas pertanian di Indonesia khususnya masalah pangan maka sarana dan prasarana telah dibangun. Pemanfaatan air oleh petani dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air di sawah. Umumnya air diperoleh dari sarana dan prasarana irigasi yang dibangun pemerintah ataupun masyarakat petani sendiri. Untuk lahan pertanian, jumlah air yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas tanam pada kebutuhan air tanaman. Dalam perencanaan kebutuhan air Irigasi, Debit andalan digunakan sebagai debit perencanaan yang diharapkan mampu menyediakan kebutuhan air untuk tanaman dan keperluan kegiatan manusia lainnya untuk waktu jangka panjang. Perhitungan debit dilakukan untuk mengetahui ketersediaan air yang ada di Kabupaten Bone.

Kebutuhan air untuk kepentingan irigasi didesa semakain penting, hal ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan air untuk irigasi ini, telah dibuat bangunan-bangunan air di sungai sebagai langkah menanggulangi kebutuhan air didalam irigasi, dengan sistem irigasi terhubung dari aliran air sungai untuk wadah aliran air irigasi tersebut, sehingga pada musim kemarau disaat debit aliran sungai berkurang pemberian air untuk irigasi ini pun berkurang untuk mengatasi kekurangan irigasi, tersebut dan untuk menghasilkan hasil panen

yang lebih memuaskan, maka masalah utama yang dihadapi para petani ialah mengusahakan tambahan air irigasi.

Kabupaten Bone terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Bone merupakan lahan persawahan yang produktif, namun tidak semua lahan pertanian tersalurkan irigasi, ketika musim kemarau yaitu pada musim tanam antara bulan Juli sampai bulan November, petani memanfaatkan sumur *pantek* (sumur bor) untuk mengambil air tanah sebagai irigasi. Sumur pantek adalah sumur yang dibuat oleh manusia untuk mengambil air tanah pada lahan pertanian. Dengan demikian petani dapat leluasa mengambil air tanah untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. Namun hal ini mengalami kendala karena tidak semua wilayah memiliki debit air tanah yang cukup untuk mengairi sawah, maka dibutuhkan upaya pengelolaan air yang tepat untuk meningkatkan produktivitas sawah yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum.

Pengelolaan sumberdaya air untuk pertanian perlu diperhatikan agar kinerja sektor pertanian dapat terus berjalan dengan baik. Salah satunya adalah pengelolaan kuantitas air untuk penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian sebagai antisipasi kebutuhan air di masa mendatang. Tanaman di Indonesia seperti padi, tebu, dan palawija hanya dapat hidup jika airnya mencukupi (Bardan, 2014: 34). Pemberian air berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Jika tanaman kekurangan air, pertumbuhannya akan terhambat. Untuk itu diperlukan pengairan buatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pembangunan proyek irigasi adalah salah satu usaha pemerintah mengelola sumberdaya air untuk pertanian. Di seluruh dunia pelaksanaan pertanian irigasi adalah umum

di daerah semi kering (Merchan dkk., 2015). Air irigasi diadakan dan diatur secara buatan untuk menunjang kegiatan pertanian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana operasi jaringan irigasi yang dilakukan untuk petani di Ponre-ponre Kabupaten Bone?.
2. Bagaimana pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan di Ponre-ponre Kabupaten Bone?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui operasi jaringan irigasi yang dilakukan untuk petani di Ponre-ponre Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan di Ponre-ponre Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam evaluasi pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bone.
- b. Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan layanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bone.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti terkait evaluasi pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bone dalam peningkatan kepuasan masyarakat tentang air untuk produktivitas sawah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengetahui bagaimana evaluasi pelayanan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bone dalam peningkatan kepuasan masyarakat.
- b. Serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bone dalam peningkatan kepuasan masyarakat.

E. Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun lingkup permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimana Operasi Jaringan Irigasi Yang Dilakukan Petani di Ponre-Ponre Kabupaten Bone dan Bagaimana Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang dilakukan di Ponre-Ponre Kabupaten Bone.

F. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan lingkup penelitian.

BAB II Adalah kajian teori dan kerangka konsep yang membahas tentang perspektif teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III Adalah metode penelitian yang membahas tentang desain penelitian, lokasi dan jadwal penelitian, fokus dan deskripsi fokus, instrument penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, rencana pengujian keabsahan data.

BAB IV Adalah uraian hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi proses perumusan perda PUG, implementasi PPRG sesuai Perda PUG, dan kendala dalam implentasi Perda.

BAB V Adalah uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Optimalisasi

a. Pengertian Optimalisasi

Optimal didefinisikan sebagai sesuatu terbaik, tertinggi, paling menguntungkan (Alwi, 2001). Pradana (2008) menyatakan bahwa optimalisasi atau optimasi adalah salah satu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematis dari suatu fungsi, peluang, maupun pencarian nilai lainya dalam berbagai kasus. Optimasi sangat berguna di hampir segala bidang dalam rangka melakukan usaha secara efektif dan efisien untuk mencapai target hasil yang ingin dicapai. Tentunya hal ini akan sangat sesuai dengan prinsip ekonomi yang berorientasikan untuk senantiasa menekan pengeluaran untuk menghasilkan outputan yang maksimal.

Menurut teori ekonomi, jika suatu variabel sudah mencapai tingkat optimal, ia tidak layak dibuat lebih banyak atau lebih sedikit tanpa menimbulkan kerugian. Dalam teori produksi, misalnya, tingkat produksi optimal adalah yang menghasilkan keuntungan terbesar. Jika produksi dikurangi, keuntungan akan berkurang, demikian halnya jika produksi ditingkatkan (Anonim, 2007).

b. Tujuan Optimalisasi

Pradana (2008) menyatakan bahwa optimalisasi bertujuan untuk melakukan usaha secara efektif dan efisien dalam mencapai target hasil yang ingin

dicapai. Ada dua tipe optimalisasi yang dapat dicapai oleh perusahaan yaitu: minimisasi biaya (*minimize cost*) atau maksimisasi profit (*maximize profit*).

Menurut Swanson (1958), optimasi atau optimalisasi harus didefinisikan terlebih dahulu, tergantung dari situasi permasalahan yang dihadapi, karena optimasi bisa berarti minimisasi biaya atau maksimisasi profit. Jadi optimalisasi bertujuan untuk menjamin penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien dalam mencapai *minimize cost* atau *maximize profit*.

2. Konsep Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003: 119) mengemukakan bahwa:

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi, pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu (2008) menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pendapat

Syamsu diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa: “Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu”.

Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah: “suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain”.

Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Sedangkan Terry (2009: 9) mengemukakan bahwa:

“Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pengelolaan Irigasi

Pengelolaan irigasi secara ideal yaitu petani menginginkan ketersediaan air yang digunakan untuk mengairi sawah berjalan dengan optimal sesuai dengan kebutuhan lahannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan irigasi. Menurut Pemerintah Republik Indonesia (2006), pengelolaan irigasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : (i) Operasi, (ii) Pemeliharaan, (iii) Rehabilitasi. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan dari Departemen Pekerjaan Umum (2007) yang terdiri dari kegiatan (i) Operasi, (ii) Pemeliharaan, sedangkan rehabilitasi masuk dalam kegiatan pemeliharaan. Maka pedoman yang digunakan yaitu peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia (2006), namun ruang lingkup pengelolaannya dibagi atas operasi dan pemeliharaan. (Sari, 2016).

- a. Operasi. Operasi jaringan irigasi merupakan proses menyalurkan air sampai ke petak sawah untuk kebutuhan tanaman sesuai dengan waktu yang direncanakan (Sargodoy *et al*, 1985). Menurut Pemerintah Republik Indonesia (2006), operasi irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melakukan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2006).
- b. Pemeliharaan Jaringan irigasi. Pemeliharaan adalah segala usaha untuk menjaga asetnya atau menyimpannya dalam kondisi dimana seperti awal mula pelaksanaan yang ditetapkan (Candy, *et all*, 2000: 3). Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2007) pemeliharaan adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Menurut Sargodoy *et al*. (1985), ruang lingkup pemeliharaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pemeliharaan. Sedangkan menurut Departemen Pekerjaan Umum (2007), ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi yaitu inventarisasi kondisi jaringan irigasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

3. Konsep Air

1. Pengertian Air

Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas (uap air). Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H_2O : satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar (Allafa, 2008).

Zat kimia ini merupakan suatu pelarut yang penting, yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garam-garam, gula, asam, beberapa jenis gas dan banyak macam molekul organik. Air sering disebut sebagai *pelarut universal* karena air melarutkan banyak zat kimia. Air berada dalam kesetimbangan dinamis antara fase cair dan padat di bawah tekanan dan temperatur standar. Dalam bentuk ion, air dapat dideskripsikan sebagai sebuah ion hidrogen (H^+) yang berasosiasi (berikatan) dengan sebuah ion hidroksida (OH^-) (Allafa, 2008). Selanjutnya yang dimaksud dengan air adalah air tawar yang tidak termasuk salju dan es. Di Indonesia jumlah dan pemakaian air bersumber pada air tanah, air permukaan dan air atmosfer, yang ketersediaannya sangat ditentukan oleh air atmosfer atau sering dikenal dengan air hujan (Kusnoputranto, 2000).

2. Sumber-sumber Air

Sumber air dapat dibedakan atas :

a. Air Hujan

Air hujan merupakan air yang didapat dari angkasa, karena terjadinya proses presipitasi (peristiwa jatuhnya air ke bumi). Air hujan merupakan penyubliman uap air menjadi air murni yang ketika turun ke bumi melalui udara melarutkan zat-zat dan partikel yang terdapat di udara seperti oksigen, karbondioksida, bakteri, debu dan lain-lain sehingga kualitasnya menjadi rendah (Kusnoputranto, 2000).

b. Air Permukaan tanah (surface water).

Air permukaan dapat berupa air yang tergenang atau air yang mengalir seperti danau, sungai, laut, rawa dan lain-lain (Azwar, 1996). Air permukaan harus diolah terlebih dahulu sebelum dipergunakan karena umumnya telah mengalami pencemaran (Entjang, 1985).

c. Air Tanah dalam (ground water).

Air tanah adalah air yang diperoleh dari pengumpulan air pada lapisan tanah dalam. Air ini umumnya sangat bersih karena telah mengalami penyaringan oleh tanah atau batu-batuan. Hanya saja kemungkinan mengandung zat mineral dalam kadar yang tinggi. Contoh air tanah, air sumur dan mata air (Azwar, 1996).

c. Air Sungai

1) Pengertian Air Sungai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 35 tahun 1991 tentang sungai, yang dimaksud dengan sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta

jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Sungai yaitu saluran pengaliran air yang terbentuk mulai dari hulu di daerah pegunungan/tinggi sampai bermuara di laut/danau. Sebagian besar air hujan yang turun ke permukaan tanah, mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah dan setelah mengalami bermacam-macam perlawanan akibat gaya berat, akhirnya melimpah ke danau atau ke laut. Suatu alur yang panjang di atas permukaan bumi tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan disebut alur sungai. Dan perpaduan antara alur sungai dan aliran air di dalamnya disebut sungai (Gayo, 1994).

Jadi yang dimaksud dengan air sungai adalah salah satu badan air yang menghasilkan air di atas permukaan daratan yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Secara umum air baku yang didapat dari sungai harus diolah terlebih dahulu, karena kemungkinan untuk tercemar polutan sangat besar (Kusnopranto, 1986).

2) Pengolahan Air sungai

Secara alamiah, sungai dapat tercemar pada daerah permukaan air saja. Pada sungai yang besar dengan arus air yang deras, sejumlah kecil bahan pencemar akan mengalami pengenceran sehingga tingkat pencemaran menjadi sangat rendah. Tetapi terkadang sebuah sungai mengalami pencemaran yang berat sehingga air mengandung bahan pencemar yang sangat besar. Hampir setiap hari sungai menerima sejumlah besar aliran sedimen baik secara alamiah, buangan

industri, buangan limbah rumah tangga, aliran air permukaan, daerah urban dan pertanian (Darwono, 2001).

Air sungai pada umumnya telah mengalami pencemaran, karena itu perlu diolah terlebih dahulu sebelum dipergunakan untuk keperluan rumah tangga. Pengolahan (purifikasi) air ini dapat dibagi dalam dua golongan yaitu purifikasi alami dan purifikasi buatan. Dalam purifikasi buatan ini air mengalami tiga proses secara bertahap yaitu proses koagulasi, filtrasi dan desinfeksi. Setelah mengalami ketiga proses tadi barulah air sungai dapat dipergunakan untuk kepentingan rumah tangga (RT).

Secara sederhana di tiap-tiap rumah dapat dibuat instalasi pengolahan air sehingga memenuhi syarat kesehatan yang akan sangat membantu pula pada usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui air. Untuk masyarakat luas pengolahan air permukaan ini dilaksanakan di instalasi yang dibangun pemerintah dan dibagikan melalui pipa (Entjang, 1985).

d. Air Bersih

1) Pengertian Air Bersih

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No 416/Menkes/PER/IX/1990 yang dimaksud dengan air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung mineral/kuman-kuman yang membahayakan tubuh. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri terdapat pengertian mengenai air

bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.

Air bersih merupakan air yang tidak menyebabkan penyakit bagi manusia. Oleh karena itu, air tersebut hendaknya diusahakan memenuhi persyaratan-persyaratan kesehatan, sekurang-kurangnya diusahakan mendekati persyaratan air yang telah ditentukan (Kusnoputranto, 2000).

2) Standar Kualitas Air Bersih

Untuk keperluan hidup manusia sehari-hari, air harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan kepentingan kesehatan manusia. Hal yang pokok adalah agar air yang diminum atau dipakai manusia tidak membahayakan manusia. Pada umumnya kualitas air bersih harus memenuhi syarat-syarat kesehatan baik secara fisik, kimia, bakteriologis dan radioaktif sesuai Permenkes No 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang persyaratan air bersih (Depkes RI, 1990).

4. Status Pengembangan Sumber Daya Air Di Indonesia

1. Sejarah Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di Indonesia

Kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia telah dimulai sejak masa Hindia-Belanda, terutama untuk sektor sumber daya air dengan dikeluarkannya Peraturan Umum tentang Air (*Algemeene Water Reglement* (AWR) pada tahun 1936. Pada masa setelah kemerdekaan, peraturan yang ditetapkan sejalan dengan UUD 1945. Pembangunan infrastruktur secara menyeluruh selanjutnya dimulai dengan

disusunnya Rencana Pembangunan Lima Tahun – I (REPELITA I) periode 1968/1969 - 1973/1974 termasuk sektor sumber daya air, transportasi, dan listrik. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara cepat selama pelaksanaan REPELITA I hingga VI. Pembangunan infrastruktur di sektor sumber daya air telah berhasil meningkatkan produksi pangan hingga mencapai swasembada pangan pada tahun 1980. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, telah dikembangkan juga infrastruktur pengairan dan sanitasi terutama sejak pelaksanaan REPELITA III. Namun demikian, pembangunan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk dimana cakupan pelayanan hanya dapat mencapai sekitar 55% dari jumlah penduduk di Indonesia. Mengingat pengembangan sumber daya air di Indonesia selalu mengalami peningkatan dan perubahan dari waktu ke waktu, maka dari itu sangat diperlukan untuk melakukan pengembangan dan peningkatan sektor sumber daya air baik dari segi kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, aspek kelembagaan, maupun pelaksanaan di lapangan.

Hal tersebut perlu diintegrasikan dengan paradigm pembangunan nasional dan pembangunan sumber daya air secara keseluruhan. Dengan meningkatnya permintaan masyarakat untuk sumber daya air baik secara kuantitas maupun kualitas, maka dapat mendorong untuk penguatan nilai ekonomi sumber daya air dibandingkan dengan nilai sosial dan berpotensi untuk terjadi konflik kepentingan antar sector, antar wilayah dan antar berbagai pihak yang terkait sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air yang lebih

mempertimbangkan nilai ekonomi akan cenderung untuk memberikan manfaat yang lebih banyak kepada kepentingan penguatan ekonomi dan akan mengesampingkan kepentingan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air. Hal ini akan menjadi kerugian bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu bersaing karena rendahnya kemampuan ekonomi, bahkan akan menyebabkan hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air tidak dapat dipenuhi. Mengingat sumber daya air merupakan sumber kehidupan, pemerintah wajib melindungi kepentingan kelompok masyarakat berkemampuan ekonomi rendah untuk mendapatkan sumber daya air secara adil dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyeimbangkan antara nilai sosial dan nilai ekonomi sumber daya air.

2. Status dan Karakteristik Sumber Daya Air di Indonesia

Secara umum, sektor sumber daya air di Indonesia menghadapi permasalahan jangka panjang terkait dengan pengelolaan dan tantangan investasi, yang akan mempengaruhi pembangunan ekonomi negara dan menyebabkan berkurangnya keamanan pangan, kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Pada tingkat kebijakan dan pelaksanaan, Indonesia menghadapi beberapa permasalahan spesifik seperti sebagai berikut:

- a. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu. Indonesia yang terletak di daerah tropis merupakan negara kelima terbesar di dunia dalam hal ketersediaan air. Namun, secara alamiah Indonesia menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan air

karena distribusi yang tidak merata baik secara spasial maupun waktu, sehingga air yang dapat disediakan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, baik dalam perspektif jumlah maupun mutu.

- b. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air. Kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong pola penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut, dan penurunan permukaan tanah.
- c. Menurunnya kemampuan penyediaan air. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air menurun semakin tajam.

- d. Meningkatnya potensi konflik air. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, pertanian maupun industri juga semakin meningkat. Pada tahun 2003, secara nasional kebutuhan air mencapai 112,3 miliar meter-kubik dan diperkirakan pada tahun 2009 kebutuhan air akan mencapai 117,7 miliar meter-kubik. Kebutuhan air yang semakin meningkat pada satu sisi dan ketersediaan yang semakin terbatas pada sisi yang lain, secara pasti akan memperparah tingkat kelangkaan air.
- e. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi. Jaringan irigasi terbangun di Indonesia berpotensi melayani 6,77 juta hektar sawah. Dari jaringan irigasi yang telah dibangun tersebut diperkirakan sekitar 1,67 juta hektar, atau hampir 25 persen, masih belum atau tidak berfungsi. Untuk jaringan irigasi rawa, hanya sekitar 0,8 juta hektar (44 persen) yang berfungsi dari 1,80 juta hektar yang telah dibangun. Selain penurunan keandalan layanan jaringan irigasi, luas sawah produktif beririgasi juga makin menurun karena alih fungsi lahan menjadi non-pertanian terutama untuk perumahan
- f. Makin meluasnya abrasi pantai. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan produktif dan wilayah pariwisata. Selain itu, abrasi pantai pada beberapa daerah perbatasan dapat menyebabkan bergesernya garis perbatasan dengan negara lain. Dengan demikian di wilayah-wilayah tersebut, pengamanan garis pantai mempunyai peran

strategis dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

- g. Lemahnya koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat reformasi memerlukan beberapa langkah penyesuaian tata pemerintahan, peran masyarakat, peran BUMN/BUMD, dan peran swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Penguatan peran masyarakat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan swasta diperlukan dalam rangka memperluas dan memperkuat basis sumber daya. Meskipun prinsip-prinsip dasar mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun masih diperlukan upaya tindak lanjut untuk menerbitkan beberapa produk peraturan perundangan turunan dari undang-undang tersebut sebagai acuan operasional. Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antarinstansi dan antardaerah otonom telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.
- h. Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi. Pengelolaan sumber daya air belum didukung oleh basis data dan sistem informasi yang memadai. Kualitas data dan informasi yang dimiliki belum memenuhi

standar yang ditetapkan dan tersedia pada saat diperlukan. Berbagai instansi mengumpulkan serta mengelola data dan informasi tentang sumber daya air, namun pertukaran data dan informasi antar instansi masih banyak mengalami hambatan. Masalah lain yang dihadapi adalah sikap kurang perhatian dan penghargaan akan pentingnya data dan informasi.

5. Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia

1. Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air

Untuk peningkatan sumber daya air di Indonesia, masih banyak diperlukan pembangunan bendungan, waduk, dan sistim jaringan irigasi yang handal untuk menunjang kebijakan ketahanan pangan pemerintah. Di samping itu untuk menjamin ketersediaan air baku, tetap perlu dilakukan normalisasi sungai dan pemeliharaan daerah aliran sungai yang ada di beberapa daerah. Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Wilayah Sungai tersebut didekati dengan suatu rencana terpadu dari hulu sampai hilir yang dikelola secara profesional. Untuk itu perlu dikembangkan teknologi rancang bangun Bendungan Besar, Bendung Karet, termasuk terowongan, teknologi Sabo, sistem irigasi maupun rancang bangun pengendali banjir.

Saat ini terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami kerusakan yaitu 62 DAS rusak dari total 470 DAS, sehingga mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air. Saat ini jaringan irigasi terbangun mencapai 6,77 juta ha (1,67 juta ha

belum berfungsi), dan jaringan irigasi rawa 1,8 juta ha yang berfungsi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Namun di sisi lain perkembangan fisik wilayah telah memberikan dampak pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian sekitar 35 ribu ha per tahun.

- a. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air. Indonesia telah melakukan langkah maju dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu (Integrated Water Resources Management – IWRM) yang menjadi perhatian dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan konsep IWRM yang berkembang di forum internasional, beberapa tindakan telah diambil di tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi kebijakan sumber daya air. Reformasi dalam pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu tindakan penting untuk mengatasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan konservasi sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya, telah diterbitkan beberapa kebijakan antara lain diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang sejalan dengan prinsip-prinsip IWRM. Undang-undang ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melalui pendekatan terbuka sehingga memberikan pilihan bagi masyarakat bisnis dan organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu. Undang-Undang Sumber Daya Air

menyatakan visi, misi, dan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air di Indonesia, sebagai dasar untuk pelaksanaan IWRM. Visi untuk pengelolaan sumber daya air berdasarkan UU SDA adalah “Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 3 UU SDA). Untuk menjalankan visi tersebut, telah diidentifikasi lima misi pengelolaan sumber daya air, yaitu: 1) konservasi sumber daya air, 2) pendayagunaan sumber daya air; 3) pengendalian daya rusak air; 4) pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah; dan 5) perbaikan data dan informasi yang ketersediaan dan transparansi. Selanjutnya, dalam rangka untuk mencapai misi tersebut, pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip harmoni, kesetaraan, kesejahteraan umum, integritas, keadilan, otonomi, transparansi dan akuntabilitas

- b. Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi. Indonesia telah memulai untuk melaksanakan reformasi terhadap kebijakan pengelolaan irigasi sejak diterapkannya Kebijakan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (Irrigation Operation and Maintenance Policy – IOMP) pada tahun 1987. Upaya reformasi tersebut merupakan respon terhadap kurangnya pembiayaan, kapasitas kelembagaan dan institusi, permasalahan kinerja yang dihadapi Pemerintah dalam rangka menjaga irigasi yang keberlanjutan. Pada tahun 1999, pemerintah menerapkan kebijakan baru yang disebut Reformasi

Kebijakan Pengelolaan Irigasi karena pelaksanaan IOMP tahun 1987 tidak sesuai dengan yang diharapkan dan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pelayanan publik termasuk untuk pengelolaan irigasi. Kedua kebijakan tersebut telah membuka ruangan yang lebih besar dan menuntut peran utama petani untuk pengelolaan irigasi melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Penerapan kedua kebijakan tersebut memberlakukan kembali komitmen pemerintah untuk perubahan pengelolaan irigasi dari dominasi institusi pemerintah menjadi bentuk baru dalam pengaturan kelembagaan yang mengedepankan kerjasama antara pemerintah dengan petani. Sebagai bentuk baru pengaturan kelembagaan, diperlukan penguatan P3A dan kerjasama yang berkesinambungan menjadi agenda penting dalam perubahan pengelolaan irigasi. Pada tahun 2006, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. PP tentang irigasi tersebut mendorong Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi partisipatif (PPSIP) sebagai pelaksanaan irigasi berbasis partisipasi petani mulai, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahap pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi untuk menjaga pemanfaatan air dalam bidang pertanian berdasarkan prinsip partisipatif, kesetaraan, kesejahteraan umum, keadilan, otonomi, transparansi dan akuntabilitas, serta berwawasan lingkungan.

Pengelolaan sistem irigasi partisipatif melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengedepankan kepentingan dan peran serta petani.

Pelaksaaannya difasilitasi oleh Pemerintah tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan memberikan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh P3A dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian. Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan irigasi perlu dilakukan untuk menjamin pengelolaan irigasi. Kelembagaan pengelolaan irigasi tersebut meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air (P3A), dan komisi irigasi. Perkumpulan petani pemakai air dibentuk secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa dan dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A) pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. Selain itu perlu dibentuk juga induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A) pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. Sementara itu, Komisi Irigasi dibentuk untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap provinsi dan kabupaten/kota.

2. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Air

- a. Arah Kebijakan. Berdasarkan peraturan terkait dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional, arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, persatuan, dan kesatuan bangsa.
- 2) Mendorong proses pengelolaan sumberdaya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah yang terkait di pusat, propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai.
- 3) Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang.
- 4) Menyeimbangkan fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu akan air dan pendayagunaan air sebagai sumberdaya ekonomi yang memberikan nilai tambah optimal dengan memperhatikan biaya pelestarian dan pemeliharannya.
- 5) Melaksanakan pengaturan sumber daya air secara bijaksana agar pengelolaan sumber daya dapat diselenggarakan seimbang dan terpadu.
- 6) Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air yang mempertimbangkan prinsip cost recovery dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- 7) Mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya air yang membuka akses partisipasi masyarakat serta mewujudkan pemisahan fungsi pengatur (regulator) dan fungsi pengelola (operator).

b. Pembiayaan Pembangunan Sumber Daya Air. Dana infrastruktur sumber daya air dianggarkan di tingkat pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan di tingkat daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penganggaran di tingkat pusat dilakukan melalui koordinasi antara lembaga-lembaga yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam mengembangkan Rencana Kerja Pemerintah tahunan. APBN dapat bersumber dari mata uang lokal, pinjaman, dan hibah dari Negara/lembaga donor.

Penganggaran di tingkat daerah prosesnya sama dengan proses penganggaran di tingkat pusat. Sumber untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pinjaman atau hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, anggaran untuk Pemerintah Daerah dapat berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3. Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan optimalisasi manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan mendefinisikan pembangunan

berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermutu adalah tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia yang layak, sehingga tercapai taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Taraf kesejahteraan ini diusahakan dicapai dengan menjaga kelestarian lingkungan alam serta tetap tersediannya sumber daya yang diperlukan. Salah satu konsep terkait dengan pembangunan yang memperhatikan dampak terkecil dari kerusakan lingkungan tetapi menghasilkan manfaat yang optimal adalah konsep *Eco-Efficiency*.

a. Konsep *Eco-Efficiency*

Eco-efficiency untuk pertama kalinya dipromosikan dalam The World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) sebagai konsep bisnis untuk memperbaiki kinerja ekonomi dan kondisi lingkungan pada setiap perusahaan. *Eco-efficiency* telah dipertimbangkan dengan memperhitungkan penghematan sumber daya dan pencegahan polusi dari industri manufaktur sebagai pemicu untuk inovasi dan daya saing di semua jenis perusahaan.

Pasar uang juga mulai mengenali nilai *eco-efficiency* karena banyak perusahaan yang menerapkan *eco-efficiency* dapat menghasilkan performa yang lebih baik secara finansial. Menurut Tamlyn, pengertian *eco-efficiency* perlu memperhatikan dampak lingkungan meliputi pertimbangan ekologi dan ekonomi yang merupakan strategi untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan nilai produksi. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka

akan terdapat upaya untuk mengurangi dampak lingkungan namun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun hal yang penting untuk dicatat adalah terjadinya hubungan yang memberikan peluang untuk saling berubah secara positif antara satu dengan yang lainnya. WBCSD telah mengidentifikasi 7 (tujuh) elemen yang dapat digunakan dalam menjalankan bisnis perusahaan untuk meningkatkan eko-efisiensi proses bisnisnya yaitu: 1) mengurangi penggunaan bahan baku; 2) mengurangi penggunaan energi; 3) mengurangi limbah beracun dari hasil produksi; 4) meningkatkan kemampuan daur ulang; 5) memaksimalkan penggunaan energi terbarukan; 6) memperpanjang daya tahan produk; dan 7) meningkatkan intensitas layanan. Indikator eco-efficiency pada tingkat perusahaan dapat diterapkan untuk mengukur seberapa besar tingkat efisiensi sumberdaya yang digunakan dalam suatu usaha. Misalnya seberapa besar sumber daya energi, air dan bahan baku utama yang digunakan untuk mentransformasikan menjadi produk yang layak jual.

WBCSD menyarankan agar menggunakan ratio antara nilai produk atau jasa per pengaruh lingkungan. Dari pernyataan WBCSD tersebut selanjutnya oleh Fuse, Horikoshi, Y.Kumai dan Taniguchi, dalam penerapannya disebut sebagai faktor eco-efficiency yang dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

- 1) Keterkaitan Eco-Efficiency dengan Infrastruktur Sumber Daya Air. Eco-efficient dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air merupakan upaya untuk mengurangi dampak negative terhadap lingkungan yang

disebabkan oleh kegiatan konstruksi, dalam hal ini adalah konstruksi infrastruktur sumber daya air yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam penerapan eco-efficiency, bahan baku yang digunakan perlu mempertimbangkan berasal dari dalam negeri. Hal ini akan mengurangi biaya pengiriman bahan baku sehingga akan lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, yang pada akhirnya dapat mengurangi emisi karbon. Pemanfaatan bahan bangunan dan teknologi ramah lingkungan perlu disosialisasikan dan dilaksanakan secara optimal untuk mengurangi dampak kerusakan ekologis dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air, serta operasi dan pemeliharannya.

2) Penerapan Eco-Efficiency dalam Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air. Dalam rangka penerapan konsep eco-efficiency dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya yang dijelaskan di bawah ini:

a) Konservasi Sumber Daya Air. Konservasi sumber daya air dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dilatarbelakangi pada beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Perlunya keseimbangan kebutuhan air saat ini dan di masa mendatang.
- (2) Penggunaan persediaan air yang ditampung pada saat musim hujan untuk digunakan pada musim kemarau.
- (3) Meningkatkan ketersediaan air tanah.

(4) Perbandingan infrastruktur skala besar dengan infrastruktur skala kecil.

(5) Kebijakan Pemerintah Indonesia: peningkatan embung yang dikelola oleh petani di perdesaan dan daerah pertanian.

Berdasarkan pengalaman, Pemerintah Indonesia saat ini mencoba untuk meminimalkan dampak pembangunan infrastruktur sumber daya air melalui pembangunan skala mikro yang meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung konsep ramah lingkungan. Dengan partisipasi masyarakat, biaya operasi dan pemeliharaan dapat lebih efisien dan anggaran dapat dikurangi.

b) Daerah Hulu (Parit resapan)

(1) Parit resapan merupakan penampungan air sementara untuk menampung limpasan air permukaan supaya terserap ke dalam tanah.

(2) Fungsi dari parit resapan tersebut adalah untuk mengurangi air limpasan, menyaring polutan, dan meningkatkan pengisian ulang air tanah.

(3) Parit resapan dibuat dengan kedalaman kurang dari 1 m dan lebar 80 cm. Parit dapat diisi dengan kerikil atau dikominasikan dengan pipa.

c) Daerah Tengah (Embung resapan)

(1) Membuat embung resapan: efektif dengan pendekatan keteknikan yang ringan, berdasarkan pada prose salami untuk mengantisipasi banjir dan kekeringan.

(2) Menyediakan waktu untuk air dapat terserap

(3) Menampung air hujan yang dapat digunakan saat musim kemarau.

(4) Meningkatkan kualitas air.

d) Daerah hilir (Sumur resapan)

(1) Membangun sumur resapan yang menjadi syarat dalam izim membangun bangunan khususnya di Kabupaten Bone.

(2) Meningkatkan pengisian kembali air tanah.

(3) Sebagai upaya untuk mengatasi ekstrasi air tanah yang akan mengakibatkan penurunan tanah.

(4) Berkontribusi dalam mengurangi limpasan air permukaan.

b. Pengendalian Banjir melalui Biopori

Biopori merupakan metode penyerapan air yang berfungsi untuk mengurangi dampak banjir dengan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Metode ini dikembangkan oleh Kamir R Brata, peneliti dari Institut Pertanian Bogor.

Konsep Biopori: Biopori adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk karena adanya berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap dan organisme tanah lainnya. Dengan adanya aktivitas tersebut maka akan terbentuk lubang-lubang yang akan menjadi tempat

berlaluinya air di dalam tanah. Bila lubang-lubang seperti ini dapat dibuat dengan jumlah banyak, maka kemampuan dari sebidang tanah untuk meresapkan air akan diharapkan semakin meningkat. Meningkatnya kemampuan tanah dalam meresapkan air akan memperkecil peluang terjadinya aliran air di permukaan tanah.

Penambahan jumlah biopori tersebut dapat dilakukan dengan membuat lubang vertikal ke dalam tanah. Lubang-lubang tersebut selanjutnya diisi bahan organik, seperti sampah-sampah organik rumah tangga, potongan rumput, dan vegetasi sejenisnya. Bahan organik ini dapat meningkatkan aktivitas organisme dalam tanah sehingga akan semakin banyak biopori yang terbentuk. Dampak dari biopori terhadap lingkungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Daya Resapan Air. Dengan menggugurkan lubang resapan biopori diharapkan dapat menambah bidang resapan air sebesar luas dinding lubang. Sebagai contoh bila lubang dibuat dengan diameter 10 cm dan dalam 100 cm maka luas bidang resapan akan bertambah sebanyak 3.140 cm^2 atau hampir $1/3 \text{ m}^2$. Dengan adanya aktivitas organisme tanah seperti cacing tanah pada lubang resapan, maka rongga pada tanah akan terbentuk dan tetap terbuka sehingga dapat melewatkan air untuk terserap ke dalam tanah. Dengan demikian kombinasi antara luas bidang resapan dengan kehadiran biopori secara bersama-sama akan meningkatkan kemampuan dalam meresapkan air.

2) Mengubah Sampah Organik Menjadi Kompos. Lubang resapan biopori diaktifkan dengan memberikan sampah organik ke dalamnya. Sampah ini akan dijadikan sebagai sumber energi bagi organisme tanah untuk melakukan kegiatannya melalui proses dekomposisi. Sampah yang telah didekomposisi ini dikenal sebagai kompos.. Dengan melalui proses seperti itu maka lubang resapan biopori selain berfungsi sebagai bidang resapan air juga sekaligus berfungsi sebagai pembuat kompos.

3) Memanfaatkan Organisme Tanah dan atau Akar Tanaman. Seperti disebutkan di atas, lubang resapan biopori diaktifkan oleh organisme tanah. Aktivitas organisme tanah dan perakaran tanaman selanjutnya akan membuat rongga-rongga di dalam tanah yang akan dijadikan saluran air untuk meresap ke dalam tanah. Dampak positif yang dihasilkan terhadap lingkungan adalah mengurangi limpasan air permukaan dan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia karena biopori dapat menghasilkan pupuk organik (kompos).

c. Pemanfaatan Teknologi Lokal Tepat Guna

1) Infrastruktur Irigasi. Dalam pembangunan saluran irigasi, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia untuk membangun saluran irigasi baru. Pertimbangan yang biasa umum dilakukan dalam membangun saluran dengan bahan beton dan batu adalah tingginya investasi untuk mengembangkan infrastruktur irigasi dan kurangnya ketersediaan batu. Untuk mendukung pendekatan eco-efficient,

Pemerintah mempertimbangkan untuk mengembangkan teknologi yang dapat mengurangi penggunaan batu sebagai konstruksi saluran irigasi, penggunaan biaya yang rendah dan penguatan partisipasi masyarakat, serta pertimbangan penggunaan material yang dapat mengurangi penggunaan batu sehingga eksploitasi batu di sungai dapat dikurangi. Berdasarkan hasil yang pernah dilakukan, efisiensi biaya dalam pembangunan irigasi mencapai 62,6% untuk saluran sekunder dan 58,16% untuk saluran tersier. Dalam mengurangi penggunaan kayu sebagai material pembangunan infrastruktur, maka didorong untuk dapat memanfaatkan bambu mengingat material tersebut mudah ditemui di sisi sungai. Selain itu biaya dari material tersebut relatif rendah, mudah untuk digunakan sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat, relatif rendah dalam penggunaan air, dan dapat mempertahankan infiltrasi air untuk penambahan persediaan air tanah.

- 2) Pembangkit Listrik Mikrohidro. Saat ini isu kelangkaan energi listrik yang menjadi fokus utama pemerintah. Pasokan listrik di desa-desa juga merupakan perhatian utama. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan energi. Partisipasi diperlukan karena kurangnya persediaan energy listrik terutama di desa-desa terpencil, harga bahan bakar yang tinggi, dan terdapat potensi untuk mengembangkan pembangkit listrik mikrohidro.

6. Konsep Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

Menurut Hardiyansah (2011: 11) mendefinisikan bahwa “pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 4) adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.”

Pendapat lain mengenai pelayanan menurut Gronross yang dikutip oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006: 2) Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau halhal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang

dimaksudkan untuk pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.

Menurut Moenir (2006:197) agar pelayanan dapat memuaskan masyarakat yang dilayaninya maka aparat pelayanan harus dapat memenuhi 4 persyaratan pokok, yaitu (a) tingkah laku yang sopan; (b) cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan; (c) waktu menyampaikan yang tepat dan (d) keramahtamahan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

2. Pengertian Publik

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan berfikir yang sama dan harapan yang sama, maksudnya setiap orang mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu hal yang bersifat umum. Sementara istilah publik berasal dari bahasa Inggris publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Menurut Litjan Poltak Sinambella, dkk (2011: 5) “kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai”.

Menurut Inu Kencana Syafie, dkk (1999: 18) arti dari kata publik itu sendiri adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”. Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai publik,

maka dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan sama, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak.

3. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006: 136) mendefinisikan pelayanan publik adalah :

Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya.

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H.A.S. Moenir (2002: 7) menyatakan: “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.”

Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 5) menyatakan pelayanan publik diartikan “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.” Sedangkan pendapat lain dari Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 4) Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non- komersial kegiatannya lebih tertuju pada

pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Standar Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian serius oleh aparat pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, sekurang-kurangnya meliputi:

a. **Prosedur pelayanan**

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.

b. **Waktu penyelesaian**

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana dan prasarana

Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam UU No. 25 tahun 2009, adapun komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.
- 2) Persyaratan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.

- 3) Sistem, mekanisme dan prosedur

Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

4) Jangka waktu penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

5) Biaya/tarif

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6) Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

7) Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

8) Kompetensi pelaksanaan

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman.

9) Pengawasan internal

Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

- 10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Tata cara pelaksanaan pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.
- 11) Jumlah pelaksana. Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya.
- 12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
- 13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, dan
- 14) Evaluasi kinerja Pelaksana Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

5. Jenis- jenis Pelayanan

Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia, karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik itu sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Keanekaragaman dan perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan adanya bermacam-macam

jenis pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut.

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 20) kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :

- 1) Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat tiba kendaraan, Surat kehilangan, Kartu Sidik Jari, Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.
- 2) Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

- 3) Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Dilihat dari bidang kegiatan ekonomi, Fitzsmmons yang dikutip oleh Saefullah (1999: 7), membedakan lima jenis pelayanan umum, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Business service*, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan konsultasi, keuangan, dan perbankan;
- 2) *Trade sevice*, kegiatan-kegiatan pelayanan dalam penjualan, perlengkapan, dan perbaikan;
- 3) *Infrastruktur service*, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam komunikasi dan transportasi;
- 4) *Sosial and personal service*, pelayanan yang diberikan antara lain dalam kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan; dan
- 5) *Public administration*, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan dari pemerintah yang membantu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan yaitu :

- 1) Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi.

- 2) Pelayanan Pembangunan, merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.
- 3) Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi.
- 4) Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
- 5) Pelayanan Kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya. Secara umum fungsi sarana pelayanan antara lain:
 - a) Mempercepat proses pelaksanaan kerja (hemat waktu);
 - b) Meningkatkan produktifitas barang dan jasa;
 - c) Ketepatan ukuran/kualitas produk terjamin penyerahan gerak pelaku pelayanan dengan fasilitas ruangan yang cukup;
 - d) Menimbulkan rasa kenyamanan;
 - e) Menimbulkan perasaan puas dan mengurangi sifat emosional penyelenggara.

Dari berbagai pendapat tentang pembagian jenis-jenis pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terlihat bahwa pelayanan umum mencakup lingkup kegiatan dan jenis-jenis yang sangat luas. Dengan kata lain, persoalan pelayanan umum dalam satu pemerintahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan karena itu membutuhkan perhatian semua kalangan, baik dari pemerintah sebagai pihak pemberi layanan maupun dari masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan.

6. Unsur-unsur Pelayanan

Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut H.A.S Moenir (2002: 8), unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Sistem, prosedur, dan metode Dalam pelayanan perlu adanya informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
- b. Personil Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana Dalam pelayanan diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan. Misalnya seperti ruang tamu, tempat parkir yang memadai dan sebagainya.

d. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanannya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah heterogen yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya.

Setiap pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan informasi prosedur yang mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha dari pemberi pelayanan agar dapat berjalan tertib dan lancar. Seperti contohnya petugas menerapkan sistem antre agar pelayanan dapat berjalan tertib.

Unsur yang juga penting selain sistem, prosedur dan metode adalah unsur personil juga memiliki peranan penting mewujudkan pelayanan yang baik. Petugas yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya pasti akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan layanan yang baik juga. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas pelayanan yang profesional untuk memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Selain profesional, petugas harus melayani dengan ramah dan sabar, mengingat masyarakat sangatlah heterogen baik pendidikannya maupun perilakunya.

Unsur pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana. Pelayan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi penggunaan layanan agar masyarakat sebagai pengguna layanan merasa nyaman. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, petugas juga akan mudah memberikan layanan.

Unsur yang terakhir adalah masyarakat sebagai pengguna layanan. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pelayanan. Tetapi selain memiliki hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban

untuk mematuhi prosedur pelayanan yang telah ditetapkan petugas agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban baik penerima layanan maupun pemberi layanan.

7. Faktor Pendukung Pelayanan

Pelayan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serata dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada proses pelayanan terdapat faktor penting dan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda-beda tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang baik.

H.A.S Moenir (2002: 88) berpendapat ada enam faktor pendukung pelayanan, antara lain :

- a. Faktor kesadaran Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa. Dengan adanya kesadaran akan membawa seseorang kepada kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Faktor aturan Aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh. Dengan adanya aturan ini seseorang akan mempunyai pertimbangan dalam menentukan langkahnya. Pertimbangan pertama manusia sebagai subjek aturan ditunjukkan oleh hal-hal penting:

- 1) Kewenangan
 - 2) Pengetahuan dan pengalaman
 - 3) Kemampuan bahasa
 - 4) Pemahaman pelaksanaan
 - 5) Disiplin dalam melaksanakan diantaranya disiplin waktu dan disiplin kerja.
- c. Faktor organisasi Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam organisasi perlu adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, dan metode untuk memperlancar mekanisme kerja.
- d. Faktor pendapatan Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. Pendapatan dalam bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jangka waktu tertentu.
- e. Faktor kemampuan Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh mana pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan.
- f. Faktor sarana pelayanan Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Adapun fungsi sarana pelayanan, antara lain:
- 1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.

- 2) Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa.
- 3) Ketetapan susunan yang baik dan terjamin.
- 4) Menimbulkan rasa nyaman bagi orang yang berkepentingan.
- 5) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional.

Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara optimal, baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan/ tindakan dengan atau tanpa tulisan.

Wolkins dalam Fandy Tjiptono (2000: 75) mengemukakan enam faktor dalam melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesimbangan. Keenam faktor tersebut meliputi: “kepemimpinan, pendidikan, perencanaan, review, komunikasi serta penghargaan dan pengakuan”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik harus memperhatikan aspek pendukung agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Faktor yang harus diperhatikan meliputi : faktor kesadaran baik dari petugas pelayanan maupun dari masyarakat; faktor aturan yang telah di tentukan oleh instansi pemberi layanan; faktor organisasi yang baik; faktor imbalan atau gaji; faktor kemampuan dalam bekerja; faktor sarana dan prasarana; komunikasi dan pendidikan.

8. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang kementerian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum misalnya Polri, Kejaksaan, Kehakiman dan sebagainya.

Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan umum, yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat, sebagai konsumen mereka. Salah satu yang dianggap sebagai biang keladinya adalah bentuk orang birokrasi, sehingga birokrasi seperti dikemukakan oleh Achmat Batinggi (1999: 53) adalah “Merupakan tipe dari orang yang dimaksudkan untuk mencapai tugas- tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang”.

Konsep birokrasi bukan merupakan konsep yang buruk. Organisasi birokrasi mempunyai keteraturan dalam hal pelaksanaan pekerjaan karena mempunyai pembagian kerja dan struktur jabatan yang jelas sehingga komponen birokrasi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan pekerjaan dalam orang birokrasi diatur dalam mekanisme dan prosedur agar tidak mengalami penyimpangan dalam

mencapai tujuan orang. Dalam organisasi birokrasi segala bentuk hubungan bersifat resmi dan berjenjang berdasarkan struktur orang yang berlaku sehingga menuntut ditaatinya prosedur yang berlaku pada orang tersebut.

Adapun yang menjadi ciri ideal birokrasi menurut Max Weber seperti yang dikutip dan diterjemahkan oleh Ahmad Batingi (1999: 53) antara lain adalah:

- a. Pembagian kerja yang kurang jelas,
- b. Adanya hierarki jabatan,
- c. Adanya pengaturan sistem yang konsisten,
- d. Prinsip formalistic impersonality,
- e. Penempatan berdasarkan karier,
- f. Prinsip rasionalitas.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan efektivitas dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan penyelenggara memiliki hak:

- a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b. Melakukan kerjasama;

- c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 15 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik penyelenggara berkewajiban:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai penyelenggara pelayanan publik hendaknya instansi 28 memperhatikan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik sesuai yang telah diamanatkan pada undang-undang.

9. Kualitas Pelayanan Publik

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan segala sesuatu yang membahagiakan. Dalam perspektif TQM (*Total Quality Management*) kualitas dipandang secara luas, yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia. Hal ini jelas tampak dalam definisi yang dirumuskan oleh Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono (2012: 51) bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sebaliknya, definisi kualitas yang bervariasi dari yang kontroversial hingga kepada yang lebih strategik.

Menurut Garvin yang dikutip Tjiptono (2012:143) menyatakan bahwa terdapat lima perspektif mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas dilihat tergantung pada orang yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan/aktifitas yang diberikan oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk dapat memberikan kepuasan kepada pihak kedua yang bersangkutan atas barang dan jasa yang diberikan.

Pelayanan memiliki pengertian yaitu terdapatnya dua unsur atau kelompok orang dimana masing-masing saling membutuhkan dan memiliki keterkaitan, oleh karena itu peranan dan fungsi yang melekat pada masing-masing unsur tersebut berbeda. Hal-hal yang menyangkut tentang pelayanan yaitu faktor manusia yang melayani, alat atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan, mekanisme kerja yang digunakan dan bahkan sikap masing-masing orang yang memberi pelayanan dan yang dilayani.

Pada prinsipnya konsep pelayanan memiliki berbagai macam definisi yang berbeda menurut penjelasan para ahli, namun pada intinya tetap merujuk pada konsepsi dasar yang sama. Menurut Sutedja (2007:5) pelayanan atau servis dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau keuntungan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pelayanan tersebut meliputi kecepatan melayani, kenyamanan yang diberikan, kemudahan lokasi, harga wajar dan bersaing (Sunarto, 2007:105).

Menurut Jusuf Suit dan Almasdi (2012:88) untuk melayani pelanggan secara prima kita diwajibkan untuk memberikan layanan yang pasti handal, cepat serta lengkap dengan tambahan empati dan penampilan menarik, sedangkan menurut Gronroos (Ratminto, 2005: 2) pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh pemberi layanan yang dimaksudkan untuk

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Ciri-ciri pelayanan yang baik menurut Kasmir (2005:39) dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan/pengunjung sejak awal hingga selesai.
- b. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
- c. Mampu berkomunikasi.
- d. Mampu memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
- e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
- f. Berusaha memahami kebutuhan pelanggan/pengunjung.
- g. Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan/pengunjung.

Pengertian kualitas jasa atau pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Lewis & Booms (dalam Tjiptono, 2012:157) mendefinisikan kualitas pelayanan secara sederhana, yaitu ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan/pengunjung. Dengan kata lain, faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diharapkan pelanggan/pengunjung dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan tersebut.

Nilai kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan perusahaan dan stafnya dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam hal ini pengunjung untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga atau instansi pemberi pelayanan jasa. Ikatan hubungan yang baik ini akan memungkinkan lembaga pelayanan jasa untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan/pengunjung serta kebutuhan mereka. Dengan demikian penyedia layanan jasa dapat meningkatkan kepuasan pengunjung dengan memaksimalkan pengalaman pengunjung yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pengunjung yang kurang menyenangkan. Apabila layanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal, tetapi sebaliknya jika layanan yang diterima atau dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan maka kualitas layanan dipersepsikan rendah.

Menurut Parasuraman dkk yang dikutip oleh Fandy Tjiptono, (2000: 70) ada beberapa kriteria yang menjadi dasar penilaian konsumen terhadap pelayanan yaitu:

- a. *Tangible*, atau bukti fisik yaitu kemampuan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.

- b. *Reliability*, atau kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
- c. *Responsiveness*, atau tanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi yang jelas.
- d. *Assurance*, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap pelanggan. Terdiri dari beberapa komponen di antaranya adalah komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.
- e. *Empathy*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan.

Levince dalam Ratminto (2006: 175) melihat efektivitas kualitas pelayanan dari indikator-indikator sebagai berikut:

- a. *Responsiveness* (Responsivilitas). Ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi, serta tuntutan dari costumers.
- b. *Responsibility* (Responsibilitas). Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuanketentuan yang telah ditetapkan.
- c. *Accountability* (Akuntabilitas). Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran

eksternal yang ada dimasyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan mengenai dimensi kriteria atau indikator di atas, meliputi :

- a. Bukti langsung (*tangibles*)
- b. Keandalan (*reliability*)
- c. Daya tanggap (*responsiveness*)
- d. Jaminan (*assurance*)
- e. Empati (*empaty*)

Unsur-unsur kualitas pelayanan yang dikutip dalam Saleh (2010: 106) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penampilan. Personal dan fisik sebagaimana layanan kantor depan (resepsionis) memerlukan persyaratan seperti berpenampilan menarik, badan harus tegap/tidak cacat, tutur bahasa menarik, familiar dalam berperilaku, penampilan penuh percaya diri.
- b. Tepat Waktu dan Janji. Secara utuh dan prima petugas pelayanan dalam menyampaikan perlu diperhitungkan janji yang disampaikan kepada pelanggan bukan sebaliknya selalu ingkar janji. Demikian juga waktu jika mengutarakan 2 hari selesai harus betul-betul dapat memenuhinya.
- c. Kesiapan Melayani. Sebagaimana fungsi dan wewenang harus melayani kepada para pelanggan, konsekuensi logis petugas harus benar-benar bersedia melayani kepada para pelanggan.

- d. Pengetahuan dan Keahlian. Sebagai syarat untuk melayani dengan baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. Di sini petugas pelayanan harus memiliki tingkat pendidikan tertentu dan pelatihan tertentu yang diisyaratkan dalam jabatan serta memiliki pengalaman yang luas dibidangnya.
- e. Kesopanan dan Ramah Tamah. Masyarakat pengguna jasa pelayanan itu sendiri dan lapisan masyarakat baik tingkat status ekonomi dan sosial rendah maupun tinggi terdapat perbedaan karakternya maka petugas pelayanan masyarakat dituntut adanya keramah tamahan yang standar dalam melayani, sabar, tidak egois dan santun dalam bertutur kepada pelanggan.
- f. Kejujuran dan Kepercayaan. Pelayanan ini oleh pengguna jasa dapat dipergunakan berbagai aspek, maka dalam penyelenggaraannya harus transparan dari aspek kejujuran, jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam pembiayaan dan jujur dalam penyelesaian waktunya. Dari aspek kejujuran ini petugas pelayanan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelayan yang dipercaya dari segi sikapnya, dapat dipercaya dari tutur katanya, dapat dipercayakan dalam menyelesaikan akhir pelayanan sehingga otomatis pelanggan merasa puas. Unsur pelayanan prima dapat ditambah unsur yang lain.
- g. Kepastian Hukum. Secara sadar bahwa hasil pelayanan terhadap masyarakat yang berupa surat keputusan, harus mempunyai legitimasi atau mempunyai kepastian hukum. Bila setiap hasil yang tidak mempunyai kepastian hukum

kelas akan mempengaruhi sikap masyarakat, misalnya pengurusan KTP, KK dan lain-lain bila ditemukan cacat hukum akan mempengaruhi kredibilitas instansi yang mengeluarkan surat legitimasi tersebut.

- h. Keterbukaan. Secara pasti bahwa setiap urusan/kegiatan yang memperlakukan ijin, maka ketentuan keterbukaan perlu ditegakkan. Keterbukaan itu akan mempengaruhi unsur-unsur kesederhanaan, kejelasan informasi kepada masyarakat.
- i. Efisien. Dari setiap pelayanan dalam berbagai urusan, tuntutan masyarakat adalah efisiensi dan efektifitas dari berbagai aspek sumber daya sehingga menghasilkan biaya yang murah, waktu yang singkat dan tepat serta kualitas yang tinggi. Dengan demikian efisiensi dan efektifitas merupakan tuntutan yang harus diwujudkan dan perlu diperhatikan secara serius.
- j. Biaya. Pemantapan pengurusan dalam pelayanan diperlukan kewajaran dalam penentuan pembiayaan, pembiayaan harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan pengeluaran biaya harus transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Tidak Rasial. Pengurusan pelayanan dilarang membeda-bedakan kesukuan, agama, aliran dan politik dengan demikian segala urusan harus memenuhi jangkauan yang luas dan merata.
- l. Kesederhanaan. Prosedur dan tata cara pelayanan kepada masyarakat untuk diperhatikan kemudahan, tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan

Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai riset yang telah dilakukan, Grongoos yang dikutip dalam Tjiptono (2005: 261) mengemukakan enam kriteria kualitas pelayanan yang dipersepsikan baik, yakni sebagai berikut:

- a. *Professionalism and Skills*. Pelanggan mendapati bahwa penyedia jasa, karyawan, sistem operasional, dan sumber daya fisik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka secara profesional (*outcomerelated criteria*).
- b. *Attitudes and Behavior*. Pelanggan merasa bahwa karyawan jasa (*customer contact personel*) menaruh perhatian besar pada mereka dan berusaha membantu memecahkan masalah mereka secara spontan dan ramah.
- c. *Accessibility and Flexibility*. Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam operasi, karyawan dan sistem operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat mengakses jasa tersebut dengan mudah. Selain itu, juga dirancang dengan maksud agar dapat menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan secara luwes.
- d. *Reliability and Trustworthiness*. Pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi atau telah disepakati, mereka bisa mengandalkan penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya dalam menentukan janji dan melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan kepentingan pelanggan.
- e. *Recovery*. Pelanggan menyadari bahwa bila terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak diprediksi, maka penyedia jasa akan segera

mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari solusi yang tepat.

- f. *Reputation and Credibility*. Pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai/imbalan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.

Kualitas layanan pada prinsipnya adalah untuk menjaga janji pelanggan agar pihak yang dilayani merasa puas dan diungkapkan. Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalani ikatan hubungan yang kuat dengan organisasi pemberi layanan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan organisasi pemberi layanan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, organisasi pemberi layanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada organisasi pemberi layanan yang memberikan kualitas yang memuaskan.

Dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi organisasi untuk menyempurnakan kualitas, organisasi bersangkutan harus mampu mengimplementasikan enam prinsip utama yang berlaku bagi perusahaan. Keenam prinsip ini sangat bermanfaat dalam membentuk mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan dengan didukung oleh

karyawan dan pelanggan. Menurut Wolkins (Saleh, 2010: 105) keenam prinsip tersebut terdiri atas:

- a. Kepemimpinan. Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin dan mengarahkan organisasinya dalam upaya peningkatan kinerja kualitas. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha peningkatan kualitas hanya akan berdampak kecil.
- b. Pendidikan. Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer puncak sampai karyawan operasional, wajib mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut antara lain konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat, teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas.
- c. Perencanaan Strategik. Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi dan misinya.
- d. Review. Proses *review* merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasi. Proses ini menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya perhatian terus menerus terhadap upaya mewujudkan sasaran-sasaran kualitas.
- e. Komunikasi. Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan, maupun dengan *stakeholder* lainnya.

f. *Total Human Reward*. *Reward* dan *recognition* merupakan aspek krusial dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan berprestasi perlu diberi imbalan dan prestasinya harus diakui. Dengan cara seperti ini, motivasi, semangat kerja, rasa bangga dan rasa memiliki (*sense of belonging*) setiap anggota organisasi dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktifitas dan profitabilitas bagi perusahaan, serta kepuasan dan loyalitas pelanggan.

7. Konsep Kepuasan Masyarakat

1. Pengertian Kepuasan

Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka masyarakat akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas. Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. Masyarakat yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang organisasi publik.

Menurut Supranto (1997: 23), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan diharapkan.

Menurut Lupiyoadi (2006: 155), faktor utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Apabila ditinjau lebih jauh, pencapaian kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pihak masyarakat
- b. Organisasi publik harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan.
- c. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk sistem saran dan kritik.
- d. Mengembangkan pelayanan untuk mencapai kepuasan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka terdapat kesamaan definisi mengenai kepuasan, yaitu yang menyangkut komponen kepuasan (harapan dan kinerja hasil yang dirasakan). Umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan masyarakat tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli dan untuk menciptakan kepuasan masyarakat, organisasi publik harus menciptakan dan mengelola sistem untuk memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan kemampuan mempertahankan masyarakat.

2. Faktor-Faktor Penentu Kepuasan Masyarakat

Menurut Lupioyadi (2006: 158), dalam menentukan tingkat kepuasan publik, terdapat lima faktor yang harus diperhatikan oleh organisasi pelayanan yaitu:

- a. Kualitas produk/jasa, publik akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk/jasa yang mereka gunakan berkualitas.
- b. Kualitas pelayanan, publik akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Emosional, publik akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadapnya bila menggunakan produk/jasa dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.
- d. Harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi mempunyai harga yang lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi.
- e. Biaya, publik tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan.

Kepuasan masyarakat merupakan respon terhadap kinerja organisasi publik yang dipersepsikan sebelumnya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan (*perceived performance*) dan harapan (*expectation*) masyarakat bisa mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan yang umum. Jika kinerja di bawah harapan, masyarakat akan tidak puas. Jika

kinerja sesuai dengan harapan, masyarakat akan puas. Apabila kinerja melampaui harapan, masyarakat akan sangat puas, senang, atau bahagia.

Penelitian mengenai *Customer – Perceived Quality* pada industri jasa oleh Berry, Parasuraman, dan Zeithaml (Rangkuti, 2003: 22), mengidentifikasi lima kesenjangan yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa yaitu:

- a. Kesenjangan tingkat kepentingan masyarakat dan persepsi manajemen. Pada kenyataannya pihak manajemen suatu organisasi publik tidak selalum merasakan atau memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh para masyarakatnya.
- b. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap tingkat kepentingan masyarakat dan spesifikasi kualitas jasa. Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, tetapi mereka tidak menyusun standar kinerja yang jelas. Hal ini dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kurangnya sumberdaya atau karena adanya kelebihan permintaan.
- c. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas dan penyampaian jasa. Beberapa penyebab terjadinya kesenjangan ini, misalnya pemberi jasa memenuhi standar kinerja, atau bahkan ketidak mauan memenuhi standar kinerja yang diharapkan.
- d. Kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. Seringkali tingkat kepentingan masyarakat dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan

atau janji yang dibuat oleh organisasi publik. Apabila diberikan ternyata tidak dipenuhi, maka terjadi persepsi negatif terhadap kualitas jasa organisasi publik.

- e. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan kesenjangan ini terjadi apabila masyarakat mengukur kinerja atau prestasi organisasi publik dengan cara yang berbeda, atau apabila masyarakat keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Topik penelitian mengenai estimasi nilai kerugian ekonomi akibat degradasi lingkungan atau kerusakan sumberdaya dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh:

1. Perkasa (2010) yang berjudul “Estimasi Nilai Kerugian Ekonomi dan *Willingness To Pay* Masyarakat akibat Pencemaran Air Tanah” diperoleh bahwa kerugian ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Kapuk Muara akibat adanya pencemaran air tanah adalah berupa korbanan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk memperoleh sumber air bersih alternatif selain air tanah, biaya untuk menyaring air tanah, dan biaya kesehatan. Total nilai kerugian yang dialami oleh masyarakat diestimasi dengan menggunakan pendekatan perilaku pencegahan (*averting behaviour method*) dengan menggunakan teknik valuasi *replacement cost*, *preventive expenditure*, dan *cost of illness*. Total kerugian yang harus dibayar oleh masyarakat Kapuk Muara

akibat pencemaran air tanah yang terjadi adalah sebesar Rp 9.926.489.524 per tahun. Adapun nilai total Willingness To Pay masyarakat untuk upaya perbaikan kualitas air tanah di Kelurahan Kapuk Muara diestimasi dengan menggunakan teknik valuasi *Contingent Valuation Method* (CVM) dan diperoleh nilai sebesar Rp 62.958.646 dari populasi Kelurahan Kapuk Muara.

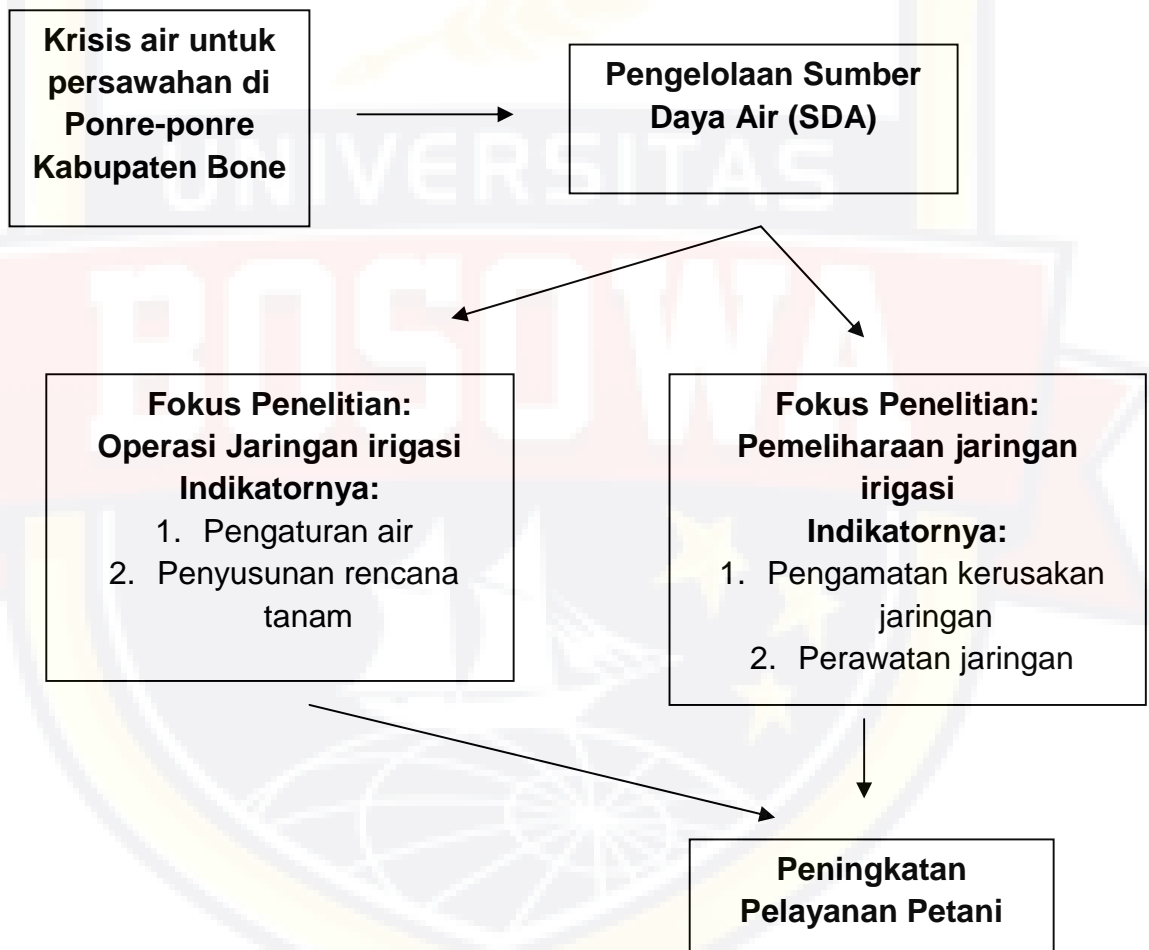
2. Wicaksono (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Estimasi Nilai Kerugian Masyarakat Akibat Bencana Banjir dan Kesiapan Membayar Masyarakat Terhadap Program Perbaikan Lingkungan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai kerugian akibat banjir yang terjadi di Kampung Pulo. Estimasi nilai kerugian dilakukan dengan menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat Kampung Pulo sebagai upaya untuk mencegah datangnya banjir yakni berupa biaya peninggian rumah, biaya penanaman pohon, biaya membangun tanggul, dan biaya kebersihan dengan menggunakan pendekatan *Damage Cost Avoided* (DCA). Berdasarkan biaya-biaya tersebut, maka total kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Kampung Pulo yaitu sebesar Rp 50.384.428.043. Adapun nilai total kesiapan masyarakat membayar untuk program perbaikan lingkungan adalah sebesar Rp 9.040.696/bulan/KK.
3. Adapun hasil penelitian Bujagunasti (2009) yang berjudul “Estimasi Manfaat dan Kerugian Masyarakat Akibat Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir” didapatkan bahwa kerugian yang dirasakan oleh

masyarakat Ciketing Udik akibat adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang diantaranya adalah pengurangan estetika, sarang penyakit, pencemaran udara, dan pencemaran air. Total nilai kerugian yang dialami oleh masyarakat diestimasi dengan menggunakan pendekatan perilaku pencegahan (*averting behaviour method*) dengan menggunakan teknik valuasi *replacement cost* untuk menghitung biaya yang dikeluarkan masyarakat atas upaya mereka untuk mengganti air bersih akibat air yang tercemar dan *cost of illness* untuk menghitung biaya berobat masyarakat akibat pencemaran air dan udara yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Total kerugian yang dialami oleh masyarakat Ciketing Udik akibat pencemaran yang terjadi adalah sebesar Rp 13.385.300 per tahun.

C. Kerangka Konsep

Sumberdaya air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. Terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antar wilayah administrasi. Berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan yang

memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. Secara sederhana kerangka konsep penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat survei. Penelitian Kuantitatif (Sumanto, 1995: 45) adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena penelitian kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini mengkaji berbagai gambaran karakteristik dari aparat yang mengimplementasikan kebijakan dalam melakukan berbagai aktivitas secara efektif sesuai dengan keterangan-keterangan secara individu dari aparat yang terlibat dalam pelayanan dan melakukan pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bone.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bone. Tempat lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bone adalah dinas yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan air untuk irigasi sawah

masyarakat di Kabupaten Bone serta tempat tinggal peneliti yang dekat dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bone yang memudahkan peneliti memperoleh data penelitian baik bersifat data primer maupun data sekunder.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Fokus pada penelitian ini terdiri atas:

- a. Operasi jaringan irigasi
- b. Pemeliharaan jaringan irigasi

2. Deskripsi fokus penelitian

- a. Operasi jaringan irigasi adalah proses menyalurkan air sampai ke petak sawah untuk kebutuhan tanaman sesuai dengan waktu yang direncanakan. Indikatornya: pengaturan air dan penyusunan rencana tanam.
- b. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah segala usaha untuk menjaga asetnya atau menyimpannya dalam kondisi dimana seperti awal mula pelaksanaan yang ditetapkan. Indikatornya: Pengamatan kerusakan jaringan dan Perawatan jaringan.

D. Sampel Data Penelitian

Populasi adalah keseluruhan unit dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui secara pasti tentang pengelolaan sumber daya air, dalam hal ini adalah pihak dinas yang terkait yang terdiri atas, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, dan staf khusus yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang jumlahnya 7 orang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah aspek pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ilmiah. Hasil instrumen penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisis sesuai dengan metode penelitian yang akan diambil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen berupa wawancara dan kuesioner.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, hasil wawancara dengan informan kunci dan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti dokumen-dokumen serta laporan-laporan dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah usaha teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan kunci yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk

mengumpulkan sejumlah data melalui penelusuran terhadap sejumlah dokumen, laporan dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

4. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian, antara lain meliputi: Rencana strategis, berbagai program pengawasan dan hasil-hasil rapat, data ini dipergunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

H. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara yang telah dituliskan melalui catatan lapangan dan dari berbagai dokumen, untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan, yang selanjutnya menyajikan apa yang dapat ditemukan.

Untuk melakukan proses analisis data ini, peneliti akan melakukan tiga tahapan proses, yaitu: (1) Tahapan reduksi data (data reduction): Data yang diperoleh

dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung (2) Tahapan penyajian data (data display): Data dimasukkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh, (3) Tahapan penarikan kesimpulan atau verifikasi (concluding drawing verivication): Dalam penelitian kualitatif, analisi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung.

Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentative, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

I. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis SWOT.

J. Defenisi Operasional

Untuk menghindari pengertian yang berbeda serta guna memudahkan pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan maka istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu diberi batasan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah semua pengelolaan air masyarakat petani di Ponre-Ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
2. Masyarakat petani adalah masyarakat di Ponre-Ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
3. Sumber Daya Air
4. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunities, and Threath) adalah identifikasi sebagai faktor secara sistematis untuk menghasilkan suatu strategi untuk optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Petani di Ponre-Ponre Kabupaten Bone.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah Selatan ke arah utara. Secara astronomis terletak pada posisi 4.130 - 15.060 Lintang Selatan dan antara 119.42°- 120.40° Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa
3. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru

Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan yang diperinci menjadi 333 desa dan 39 kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 888 dan lingkungan sebanyak 121. Jumlah penduduk seluruhnya adalah 699.474 jiwa pada tahun 2017.

Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan seperti program Keluarga Berencana yang terbukti dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi penduduk. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Bone pada tahun 2017 tercatat 5.860 pegawai.

Dilihat dari lapangan usaha sebagian besar penduduk Kabupaten Bone bekerja di sektor pertanian yang berjumlah 375.548 jiwa (66,03 persen) dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lain yang juga banyak menguras tenaga kerja adalah sektor jasa (18,37 persen) dan perdagangan, hotel dan restoran (12,92 persen). Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian dan semangat kebangsaan sehingga dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Karena itu sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia.

Aspek kesehatan merupakan bagian yang terpenting pula diharapkan dapat menghasilkan derajat kesehatan yang lebih tinggi dan memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bone diharapkan agar pelayanan kesehatan meningkat lebih luas, lebih merata terjangkau oleh lapisan masyarakat. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan berupa rumah sakit sebanyak dua buah, puskesmas sebanyak tiga puluh enam buah, puskesmas pembantu sebanyak enam puluh lima buah dan posyandu sebanyak sembilan ratus lima belas buah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman pangan. Pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan, diarahkan untuk meningkatkan produksi palawija dan hortikultura. Peningkatan produksi padi dilakukan melalui program dalam bentuk Insus dan Inmum serta ditunjang dengan pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai. Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Bone di dominasi sektor pertanian khususnya di sektor pertanian tanaman pangan. Selanjutnya, adalah sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor perikanan.

Luas panen tanaman padi di Kabupaten Bone akhir tahun 2017 sebesar 117.066 ha. Produksinya tercatat 658.441 ton gabah kering giling atau rata-rata produksi 5.62 ton/ha. Luas panen tanaman palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelei dan kacang hijau) pada tahun 2007 seluas 61.796 ha dengan jumlah produksi tercatat 215.783 ton. Usaha pokok yang ditempuh dalam pembangunan tanaman perkebunan adalah intensifikasi, rehabilitasi dan extensifikasi tanaman di perkebunan Kabupaten Bone termasuk banyak. Namun yang termasuk dalam komoditi andalan tahun 2017 adalah antara lain kakao 12.870 ton, kelapa 11.667 ton, tebu 25.710 ton, kemiri 6.890 ton dan cengkeh 2.087 ton.

Hutan sebagai sumber daya alam merupakan modal kekayaan bangsa yang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena hutan juga berfungsi sebagai daerah penyanggah terutama sangat berperan dalam menjaga kelestarian air dan lingkungan hidup. Dengan demikian

hutan perlu dilindungi, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kemakmuran rakyat sekaligus dijaga kelestariannya, dengan melakukan usaha seperti reboisasi dan penghijauan bagi hutan/tanah yang nampak mulai gundul pada tahun 2017 luas areal reboisasi 2.100 ha sedangkan luas areal penghijauan 1.150 ha.

Sumber protein yang utama bagi manusia berasal dari protein hewan termasuk ikan. Keberhasilan sub sektor peternakan dapat dilihat melalui indikator naik turunnya populasi ternak dan unggas. Populasi ternak besar di Kabupaten Bone selama kurun waktu tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yaitu: populasi ternak besar (sapi, kerbau, kuda, kambing) pada tahun 2006 tercatat 156.433 ekor naik menjadi 164.006 ekor pada tahun 2007 atau naik sekitar 4,84 persen. Ternak unggas (ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras dan itik) pada tahun 2006 populasinya sebesar 1.538.672 ekor turun menjadi 1.001.074 ekor pada tahun 2007 atau turun sekitar 34,94 persen.

Kabupaten Bone terletak dipinggir pantai yang berpotensi terhadap sub sektor perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut. Pada sub sektor perikanan laut jumlah perahu motor dan perahu tanpa motor penangkap ikan pada tahun 2017 masing-masing tercatat 600 buah dan 2.551 buah. Untuk sub sektor perikanan darat, menurut jenis pemeliharaan, meliputi tambak dan kolam masing-masing luasnya tercatat sebesar 15.244 ha dan 1.970 ha.

Sumbangan sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bone adalah sebesar 8,28 persen. Angka ini lebih rendah di banding tahun 2006 yang mencapai

8,36 persen. Jumlah unit usaha sektor industri pengolahan di Kabupaten Bone tahun 2012 tercatat 4.945 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 5.421. Adapun jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan pada tahun 2012 sebanyak 15.906 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 17.718 orang.

Peningkatan jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan ini akibat dari adanya kemudahan–kemudahan dalam proses industri dan tersedianya sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memacu sektor industri agar lebih efisien dan mampu bersaing pada pangsa pasar. Potensi pertambangan di Kabupaten Bone cukup besar dan terdiri dari emas, batu bara, pasir silika, tembaga mangan, endapan besi, batu gamping, marmer, pasir kuarsa, dan lain-lain. Namun sampai saat ini masih dalam tahap penjajakan (survei) dan belum ada yang diolah.

Pekembangan sarana dan prasarana perhubungan baik langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh pada perkembangan kehidupan sosial ekonomi suatu wilayah demikian juga sebaliknya. Hal itu menjadi sesuatu yang penting terutama daerah yang cukup luas dengan sumber daya yang beragam seperti halnya Kabupaten Bone.

Pada tahun 2017 PAD Kabupaten Bone mencapai 34,59 miliar rupiah atau meningkat 63,65 persen dibanding tahun 2016. Kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 3.67 persen sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 5.2 persen. Penyumbang PAD terbesar

adalah retribusi daerah yang mencapai 44,62 persen. Kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki dan kemampuan daerah itu untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki.

Semua upaya dan kebijaksanaan pembangunan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017 telah mencapai Rp. 4.423,74 miliar. Jika dibanding dengan nilai PDRB tahun 2016 sebesar Rp. 3.680,83 miliar maka terjadi kenaikan sebesar 14,58 persen. Salah satu manfaat hasil perhitungan PDRB yaitu dapat digunakan untuk melihat gambaran struktur perekonomian suatu daerah atau wilayah. Struktur perekonomian didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan total PDRB tahun 2017 sebesar 54,34 persen urutan kedua sektor-sektor jasa sebesar 12,40 persen disusul sektor industri pengolahan 8,28 persen dan sektor perdagangan restoran dan hotel 7,41 persen dan sektor lainnya sebesar 17,58 persen.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah adalah PDRB perkapita. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bone dari tahun 2014 sampai tahun 2017 telah berkembang sangat pesat. Pada tahun 2014 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bone mencapai Rp. 4.336.948 dan pada tahun 2017 telah meningkat menjadi Rp. 6.324.386

B. Temuan Penelitian

1. Operasi Jaringan Irigasi

Operasi jaringan irigasi merupakan proses menyalurkan air sampai ke petak sawah untuk kebutuhan tanaman sesuai dengan waktu yang direncanakan (Sargodoy *et al*, 1985). Menurut Pemerintah Republik Indonesia (2006), operasi irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melakukan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2006)

Dalam penelitian ini, operasi jaringan irigasi dibagi menjadi dua yakni:

a. Pengaturan air

Jaringan irigasi (bangunan sadap, bangunan ukur, bangunan bagi, saluran, dll) perlu diamankan agar fungsi dan kondisinya dapat terjaga. Kondisi yang baik belum tentu fungsinya juga baik, demikian juga sebaliknya. Untuk menjaga jaringan irigasi tersebut, maka perlu dilakukan usaha-usaha pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone menjelaskan:

“sistem kerja pengaturan irigasi telah ditentukan oleh pemerintah. Pengaliran ke petak-petak sawah dilakukan saat musim tanam tiba

khususnya saat musim pancaroba dan krisis air” (tanggal wawancara 3 Agustus 2018).

Menambahkan pendapat di atas, salah satu pegawai di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone atas nama Burhan, menyatakan:

“kalo masalah pengaturan irigasi, pihak dinas telah menunjuk pegawai untuk melakukan buka tutup jaringan irigasi yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas tanam petani apalagi saat musim kemarau tiba”. (tanggal wawancara 2 Agustus 2018).

Hal serupa disampaikan oleh salah satu staf atas nama Muhaemin yang menyatakan:

“pada saat tertentu dilakukan pembukaan terhadap jaringan irigasi yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh petani untuk mengairi sawah mereka agar terhindar dari kekeringan”. (tanggal wawancara 5 Agustus 2018).

Salah satu staf atas nama Maryam menambahkan:

“pengairan dilakukan minimal 2 minggu sekali atau tergantung dari keadaan sawah petani, jika mulai kering maka dilakukan buka tutup jaringan irigasi lagi”. (Tanggal wawancara, 2 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas, sejalan dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dimana pada saat terjadi kekurangan jumlah debit air di lahan persawahan milik petani, maka pihak Dinas segera melakukan pembukaan jaringan irigasi sehingga lahan pertanian masyarakat terhindar dari kekeringan.

b. Penyusunan rencana tanam

Penyusunan rencana tata tanam dilakukan menjelang awal tahun tanam untuk menentukan jenis tanaman dan waktu tanam di suatu Daerah Irigasi. Tata tanam disusun oleh instansi teknis yang berwenang dengan prinsip partisipatif, artinya melibatkan peran serta petani untuk mengusulkan tanaman yang akan

ditanam pada tahun tanam berikut. Keterlibatan petani disalurkan melalui P3A.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone menjelaskan:

“rencana tanam telah dilakukan pada awal masa tanam yakni pada awal musim penghujan, pengaturan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kekurangan air di musim kemarau” (tanggal wawancara 3 Agustus 2018).

Menambahkan pendapat di atas, salah satu pegawai di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone atas nama Wahyuddin, menyatakan:

“kami sudah mengatur rencana tanam selama setahun, ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil tanam petani dan mengurangi dampak kekurangan air. Jika masa tanam diatur sesuai dengan perkiraan lamanya musim penghujan, maka kemungkinan timbulnya kekeringan pada masa tanam di periode kemarau akan kecil”. (tanggal wawancara 2 Agustus 2018).

Hal serupa disampaikan oleh salah satu staf atas nama Marwan yang menyatakan:

“pengaturan masa tanam, diatur sesuai dengan musim, kan jumlah air di bendungan tergantung dari banyaknya curah hujan dan lamanya hujan. Jadi saat mendekati musim penghujan, tanaman yang ditanam di sawah adalah padi sedangkan saat musim kemarau, biasanya petani akan menyelingi dengan menanam kacang tanah dan jagung karena kedua tanam ini tidak membutuhkan air yang banyak”. (tanggal wawancara 5 Agustus 2018).

Hasil wawancara yang telah dilakukan senada dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa waktu tanam yang terjadi di Kabupaten Bone yang cukup bervariasi antar kecamatan. Sebagian besar petani di Kabupaten Bone menanam padi pada bulan Oktober dan penanaman masih berlangsung sampai bulan Desember. Luas tanam pada musim

kering cukup tinggi karena diduga terdapat lahan sawah rawa atau pasang surut yang menghindari musim hujan untuk bercocok tanam. Akhir musim hujan merupakan puncak luas tanam, yang juga diikuti dengan penanaman pada musim kemarau dan sedikit di musim hujan.

2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pemeliharaan adalah segala usaha untuk menjaga asetnya atau menyimpannya dalam kondisi dimana seperti awal mula pelaksanaan yang ditetapkan (Candy, *et all*, 2000: 3). Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2007) pemeliharaan adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus.

Jaringan irigasi dapat cepat rusak karena adanya hujan/air, sengatan sinar dan panas matahari secara langsung, hewan/manusia, tanaman liar atau karena rancangan dan konstruksi fasilitas dan jaringan yang kurang baik, sehingga:

- a. Sinar matahari yang panas akan mengakibatkan keretakan yang memudahkan badan saluran terkikis;
- b. Hujan lebat akan menekankan dan menerpa badan bangunan sehingga mudah tergerus dan tererosi;
- c. Air yang mengalir deras melebihi kecepatan rencana, akan mengikis badan saluran sehingga proses penggerusan dan erosi akan terjadi sangat mudah;

- d. Keberadaan hewan yang dilepas secara liar di sekitar bangunan dan fasilitas irigasi akan dapat merusak fasilitas tersebut apabila tidak ditangani secara baik;
- e. Bagian dari tanaman liar (daun, batang, akar) akan mengganggu kelancaran pengaliran air;
- f. Ukuran, letak, spesifikasi dan kualitas bangunan yang tidak tepat akan berpengaruh negatif terhadap pemeliharaan jaringan;
- g. Sementara itu, perbuatan manusia yang seringkali kurang sadar dan kurang memahami pentingnya upaya pembagian air, dengan sendirinya akan banyak berpengaruh terhadap tidak efektifnya fungsi jaringan irigasi.

Untuk menjaga agar kondisi irigasi tetap baik, diperlukan partisipasi tenaga oleh masyarakat, guna membantu pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone menjelaskan:

“tugas perbaikan saluran irigasi adalah salah satu tugas dari dinas kami, namun karena banyaknya kegiatan maka kadang kala masyarakat memabtu kami dalam proses pengamanan jaringan irigasi” (tanggal wawancara 3 Agustus 2018).

Menambahkan pendapat di atas, salah satu pegawai di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone atas nama Wahyuddin, menyatakan:

“kami selaku aparat dan pengelola jaringan irigasi biasanya melakukan pengamanan jalur irigasi guna menjaga agar saluran irigasi tidak terganggu. Tindakan yang kami lakukan biasanya memasang tanda larangan

membuang sampah dan memasang portal yang menuju ke jaluran irigasi agar kendaraan berat tidak memasuki kawasan irigasi. Ini kami maksudkan agar kondisi saluran irigasi tetap aman”. (tanggal wawancara 2 Agustus 2018).

Hal serupa disampaikan oleh salah satu staf atas nama Mansyur yang menyatakan:

“kalo pengamanan jalur irigasi, dari pihak pemerintah sudah adami, banyak tanda larangan na pasang di sepanjang jalur irigasi”. (tanggal wawancara 5 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2006, tentang Irigasi, pasal 59 menyebutkan bahwa pengamanan jaringan bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh hewan, manusia atau daya rusak alam. Jaringan irigasi (antara lain bangunan sadap, bangunan ukur, bangunan bagi, saluran dan sebagainya) perlu diamankan agar fungsi dan kondisinya dapat terus terjaga. Kondisi fisik jaringan irigasi yang baik belum tentu fungsinya juga baik, demikian juga sebaliknya fungsinya bisa berlangsung secara baik meskipun kondisi fisiknya hanya berupa jaringan dan bangunan yang sederhana saja.

Untuk menjaga jaringan irigasi tersebut, maka perlu dilakukan usaha-usaha pengamanan, yang tidak saja dilakukan oleh petugas Pemerintah namun juga harus dilakukan oleh petani pemakai air. Untuk dapat melakukan pengamanan jaringan irigasi yang memadai secara fisik maupun fungsinya, perlu diketahui hal-hal yang harus dihindarkan yang berkaitan dengan jaringan irigasi tersebut. Hal-hal tersebut perlu dihindarkan karena secara teknis akan berpengaruh terhadap kemampuan jaringan sedemikian rupa untuk mampu secara

efisien menyalurkan air ke petak-petak sawah. Namun demikian, apabila masyarakat tani dengan secara dialogis sepakat bahwa hal tersebut tidak perlu dilarang dengan resiko yang ada, maka hal tersebut dengan sendirinya dapat dibenarkan secara intern dilingkungan mereka. Konsekuensi terhadap pelanggaran terhadap hal-hal yang seharusnya dapat dihindari tapi masih dilakukan oleh beberapa petani, akan mengakibatkan permasalahan yang berbuntut perselisihan, baik antar anggota P3A atau antar P3A dengan organisasi lain yang setidaknya memerlukan upaya dan waktu untuk mengatasinya. Termasuk kegiatan pencegahan antara lain: 1) Menetapkan garis sepadan . 2) Memasang tanda larangan membuang sampah di saluran/bangunan. 3) Memasang portal pada jalan inspeksi, untuk mencegah kendaraan berat roda 4 masuk jalan inspeksi.

Selain melakukan pengamanan terhadap jalur irigasi, bentuk partisipasi tenaga dilakukan juga dengan melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan darurat. Pemeliharaan rutin adalah kegiatan perawatan pada jaringan irigasi yang biasanya dilaksanakan setiap tahun seperti : 1) Membersihkan sampah, lumpur dan pintu air; 2) Memotong rumput dan tumbuhan pengganggu di sepanjang saluran; 3) Mengoptimalkan penampang saluran; 4) Menutup bocoran kecil; 5) Memberikan pelumas pintu air.

Hasil wawancara tentang pemeliharaan rutin jaringan irigasi terhadap informan diperoleh hasil:

Salah satu pegawai di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone atas nama Budiman, menyatakan:

“masyarakat di sekitar jaringan irigasi setiap satu bulan atau kurang dari sebulan melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik irigasi. Kegiatan tersebut berupa pembersihan sampah, memotong rumput, dan menutup kebocoran yang skalanya kecil. Namun jika kerusakannya terbilang parah, misalnya ada yang jebol, maka masyarakat tidak dapat membantu banyak, mengingat mereka melakukan bantuan menggunakan swadaya, sedangkan untuk kerusakan yang besar membutuhkan modal yang besar pula”. (tanggal wawancara 2 Agustus 2018).

Hal serupa disampaikan oleh salah satu staf atas nama Maliki yang menyatakan:

“kalo kerusakan kecilji, biasaji na atasi warga seperti membersihkan sampah sama menambal yang bocor tap kalo ada yang ambles tidak bisami kodong ka mahal pasti ongkosnya”. (tanggal wawancara 5 Agustus 2018).

Salah satu staf atas nama Maryuni menambahkan:

“pernah ada salah satu bagiannya yang rusak tapi kecilji retak ji mungkin, jadi masyarakat bekerjasama ki untuk menambal yang rusak biar tidak jadi besar, ka yang rugi nantinya kita sendiri juga”. (Tanggal wawancara, 2 Agustus 2018).

Pemeliharaan dalam skala besar dilakukan dalam kurung waktu lebih dari 1 tahun yang biasa disebut dengan pemeliharaan perbaikan berkala. Pemeliharaan perbaikan berkala adalah kegiatan perbaikan pada jaringan irigasi yang biasanya dilaksanakan lebih dari 1 tahun, misalnya : 1) Mengecat pintu air dan mengganti skot balk yang lapuk ; 2) Menggali endapan lumpur; 3) Memperbaiki sayap bangunan dan tembok saluran; 4) Memperbaiki dan mengecat rumah bangunan bagi; 5) Meninggikan tanggul saluran; 6) Memperbaiki bendung (sayap, pintu air dan lain-lain); 7) Mengganti pintu air yang rusak; 8) Memperbaiki kerusakan

akibat bencana alam secara pemanen, setelah lebih dulu sudah dilaksanakan dengan perbaikan darurat.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone menjelaskan:

“untuk perbaikan skala besar biasanya dilakukan dalam kurung waktu yang agak lama mengingat perbaikan membutuhkan dana yang cukup besar. Dalam hal ini masyarakat tidak dapat membantu sama sekali” (tanggal wawancara 3 Agustus 2018).

Menambahkan pendapat di atas, salah satu pegawai di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone atas nama Wahyuddin, menyatakan:

“perbaikan skala besar dilakukan untuk memperbaiki hal-hal seperti: 1) Mengecat pintu air dan mengganti skot balk yang lapuk; 2) Menggali endapan lumpur; 3) Memperbaiki sayap bangunan dan tembok saluran; 4) Memperbaiki dan mengecat rumah bangunan bagi; 5) Meninggikan tanggul saluran; 6) Memperbaiki bendung (sayap, pintu air dan lain-lain); 7) Mengganti pintu air yang rusak;”. (tanggal wawancara 2 Agustus 2018).

Hasil wawancara yang telah dilakukan senada dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa: partisipasi masyarakat hanya terbatas pada perbaikan ringan saja misalnya membersihkan samapah dan membersihkan lumpur, sedangkan perbaikan dalam skala besar belum dapat dilakukan mengingat banyaknya jumlah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan tidak sedikit. Partisipasi Tenaga yang belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan, baik itu dari proses operasi, pemeliharaan, maupun rehabilitasi jaringan irigasi. Seharusnya untuk dapat menjaga saluran irigasi tetap bersih dan terawat, diperlukan partisipasi para petani pemakai air yang maksimal sehingga kelancaran dari air saluran irigasi dapat mengalir lancar

tanpa hambatan dan kondisi badan saluran irigasinya tetap terjaga tanpa ada sedikit bagian-bagian yang rusak dan membutuhkan rehabilitasi, yang pastinya memerlukan biaya yang lebih mahal.

C. Pembahasan Penelitian

1. Operasi Jaringan Irigasi

Operasi jaringan irigasi merupakan proses menyalurkan air sampai ke petak sawah untuk kebutuhan tanaman sesuai dengan waktu yang direncanakan (Sargodoy *et al*, 1985). Menurut Pemerintah Republik Indonesia (2006), operasi irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melakukan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2006)

Dalam penelitian ini, operasi jaringan irigasi dibagi menjadi dua yakni:

a. Pengaturan air

Jaringan irigasi (bangunan sadap, bangunan ukur, bangunan bagi, saluran, dll) perlu diamankan agar fungsi dan kondisinya dapat terjaga. Kondisi yang baik belum tentu fungsinya juga baik, demikian juga sebaliknya. Untuk menjaga jaringan irigasi tersebut, maka perlu dilakukan usaha-usaha pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: sistem kerja pengaturan irigasi telah ditentukan oleh pemerintah. Pengaliran ke petak-petak sawah

dilakukan saat musim tanam tiba khususnya saat musim pancaroba dan krisis air. Pihak dinas telah menunjuk pegawai untuk melakukan buku tutup jaringan irigasi yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas tanam petani apalagi saat musim kemarau tiba. Pengairan dilakukan minimal 2 minggu sekali atau tergantung dari keadaan sawah petani.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnugroho. Pada penelitiannya diperoleh hasil sebagai berikut: Pola pengelolaan sumberdaya air di suatu wilayah sungai tergantung pada beberapa hal. Kebutuhan dan tujuan pokok pengelolaan, peran yang akan dilakukan organisasi pengelola seperti yang diuraikan dalam tabel 1, serta alokasi dan pengaturan pemenuhan kepentingan antara badan pengelola dengan organisasi terkait sangat berpengaruh dalam penentuan bentuk organisasi.

Tugas/ mandat, kewenangan maupun kemampuan organisasi pengelola wilayah sungai merupakan faktor yang saling berkaitan. Faktor kepada organisasi pengelola wilayah sungai. Tugas adalah harapan pemberi mandat yang harus dilaksanakan dan dihasilkan oleh penerima mandat. Tugas yang diberikan, keadaan sosio-ekonomi, geografis serta hidrologis wilayah akan menentukan pola pengelolaan wilayah sungai.

Faktor kedua adalah kewenangan/otoritas yang harus dimiliki oleh penerima mandat untuk menjalankan segala tugas yang diberikan guna memenuhi harapan pemberi mandat. Jika otoritas ini kurang optimal, maka penerima mandat akan sulit menjalankan segala tugas yang diberikan. Otoritas (authority) meliputi:

- 1) otoritas formal dan
- 2) otoritas informal.

Dalam kaitannya dengan organisasi pengelola sumberdaya air, otoritas formal berupa kewenangan (power) yang diberikan oleh pemerintah kepada pengelola wilayah sungai, antara lain kewenangan menarik retribusi para pelanggan. Lembaga pengelola wilayah sungai yang merupakan organ Pemerintah biasanya tidak diberi wewenang untuk menarik retribusi untuk pengoperasian dan pemeliharaan sebagai biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Lain halnya dengan lembaga pengelola wilayah sungai yang bersifat badan usaha yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan. Sedangkan otoritas informal berupa perhatian, kepercayaan maupun dukungan dari para pemilik kepentingan.

Faktor ketiga adalah kemampuan yang harus disiapkan oleh penerima mandat. Kinerja penerima mandat akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan yang ada. Kemampuan terdiri:

- 1) sumberdaya (manusia, peralatan, infrastruktur, sistem, dan lain-lain) dan
- 2) keuangan.

Kedua faktor terakhir (kewenangan dan kemampuan) akan sangat berpengaruh pada kinerja organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan. Berdasarkan pola pengelolaan beberapa *RBO (River Basin Organizations)* di Asia-Pasifik beserta faktor-faktor yang berpengaruh seperti yang diuraikan di atas, maka secara garis besar tipe/ model pengelolaan wilayah sungai (*RBO – River Basin Organization*) dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Dewan/Komite (*council/ committee*), yaitu perhimpunan para pemilik kepentingan (*stakeholders*) dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air untuk kepentingan bersama.
- 2) Pemerintah (*public RBO/ River Basin Office*), yaitu lembaga yang merupakan organ Pemerintah, biasanya diletakkan di bawah Kementerian dan karyawannya merupakan pegawai pemerintah, dan
- 3) Perusahaan (*corporate RBO*), biasanya dimiliki oleh Pemerintah, namun penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan dilakukan dengan sistem bisnis.

Pengelolaan sumberdaya air terpadu memiliki peran penting menjamin ketersediaan air dan mengatasi berbagai tantangan antara lain masalah sosio-ekonomi, budaya, degradasi lingkungan, perubahan populasi, iklim global dan sebagainya. Pengelolaan sumberdaya air berdasarkan pada wilayah sungai, mengingat air merupakan sumberdaya yang mengalir (*flowing resources*), yang tidak mengenal batas administrasi pemerintahan.

Pengelolaan wilayah sungai dengan lembaga di bawah organ Pemerintah cocok untuk diterapkan di negara berkembang karena pembangunan infrastruktur dibiayai dengan dana Pemerintah dan mempunyai kekuatan kuat untuk proses pengaturan, perijinan, penegakan hukum, dan lain-lain. Seperti halnya di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya alam termasuk air yang terkandung didalamnya harus dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat, sehingga pengelola sungai di bawah organ Pemerintah akan

dapat berfungsi sebagai pengatur (regulator) dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai.

Akan tetapi, lembaga ini mempunyai keterbatasan dalam kewenangan pengaturan keuangan, misalnya penarikan retribusi. Dalam pelaksanaannya, sistem ini dapat disinerjikan dengan sistem corporate guna keluwesan pengaturan keuangan sebagai biaya jasa pengelolaan sumberdaya air agar diperoleh kelanggengan (*sustainability*) dalam pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai.

Dengan demikian, sistem pengelolaan sungai yang cocok untuk diterapkan adalah yang dapat menjawab mandat yang diamanatkan serta memenuhi berbagai kepentingan yang ada di wilayah sungai tersebut. Akan tetapi, kesuksesannya masih tergantung pada:

- 1) Dukungan dan komitmen politik
- 2) Hubungan baik dengan pengguna air dan pemi-lik kepentingan lainnya
- 3) Sumber daya manusia dan kepemimpinan yang baik

b. Penyusunan rencana tanam

Penyusunan rencana tata tanam dilakukan menjelang awal tahun tanam untuk menentukan jenis tanaman dan waktu tanam di suatu Daerah Irigasi. Tata tanam disusun oleh instansi teknis yang berwenang dengan prinsip partisipatif, artinya melibatkan peran serta petani untuk mengusulkan tanaman yang akan ditanam pada tahun tanam berikut. Keterlibatan petani disalurkan melalui P3A. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maka

dapat disimpulkan bahwa: rencana tanam telah dilakukan pada awal masa tanam yakni pada awal musim penghujan, pengaturan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kekurangan air di musim kemarau, jenis tanaman yang ditanam pun beragam tergantung dari musim dan keinginan petani.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Argon. Pada penelitiannya diperoleh hasil sebagai berikut: Petani di Pulau Kalimantan berusaha menyikapi perubahan iklim yang ada dengan memajukan atau memundurkan waktu tanam. Namun ada aspek lain berkaitan dengan kondisi iklim yang berubah. Pulau Kalimantan memiliki lahan sawah lebak, pasang surut dan rawa, yang pada saat curah hujan tinggi justru mengalami keterlambatan waktu tanam. Dinamika fluktuasi air pada lahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut agar dapat dilakukan peningkatan indeks pertanaman, dengan melakukan penataan drainase, menampung kelebihan air pada musim hujan, dan varietas tahan rendaman. Utama *et al.* (2009) menyatakan perlunya juga varietas tanaman padi yang tahan salinitas, agar lahan rawa makin dikembangkan sebagai alternatif pengembangan lahan padi.

Semakin pendeknya musim tanam juga dapat diatasi dengan pengembangan varietas padi berumur genjah. Varietas lokal yang banyak ditanam saat ini, seperti Siam Pandak, Siam Unus, Siam Saba, Siam Mutiara, Siam Mayang, Pandak, Siam Arjuna dan Siam Kuning, umumnya berusia sampai dengan 6 bulan. Varietas campuran jenis lokal dan hibrida seperti varietas Margasari dan Martapura juga sudah dikembangkan dengan usia tanaman yang

lebih pendek yaitu 130 hari. Keberhasilan dalam mengembangkan varietas umur genjah secara langsung dapat meningkatkan indeks pertanaman padi yang tentunya berpeluang meningkatkan produksi padi.

Berkaitan dengan usaha pemenuhan kebutuhan pangan nasional, informasi untuk mengetahui lokasi dan waktu kegiatan tanam padi mulai dilakukan sangat diperlukan oleh pengambil kebijakan. Manfaat utama informasi ini adalah persiapan penanaman yang meliputi benih, pupuk spesifik lokasi. Manfaat lain adalah bahwa sebaran waktu penanaman padi yang dilakukan petani di seluruh Indonesia dapat dipahami secara spasial maupun temporal, sehingga penyusunan perencanaan pemenuhan kebutuhan beras nasional sepanjang tahun di seluruh Indonesia dapat dilakukan.

Kementrian Pertanian mengembangkan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang merupakan bentuk pembelajaran yang seluruh proses belajar-mengajarnya dilakukan di lahan petani peserta PTT dalam upaya peningkatan produksi padi nasional. Salah satu materi pembelajaran adalah penggunaan atlas kalender tanam (Las 2009a,b; Runtunuwu *et al.*, 2011a,b) yang menggunakan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di dalam menyusun rencana waktu tanam.

Sebagian besar petani di Kalimantan mulai melakukan penanaman padi pada Sep I/II setiap tahun, walau puncak penanamannya sangat bervariasi antar provinsi. Kalimantan Barat mencapai puncaknya pada periode Okt II/III dan penanaman padi masih berlangsung sampai bulan Desember. Penanaman padi di

Kalimantan Timur tertinggi terjadi pada periode Jan I/II, dan kembali terjadi pada Jun II/III. Petani di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mencapai puncak penanaman pada Mar III/Apr I. Apabila informasi ini diperoleh secara nasional, maka usaha pemenuhan kebutuhan beras sepanjang tahun dapat disesuaikan dengan waktu yang sering dilakukan oleh petani

2. Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pemeliharaan adalah segala usaha untuk menjaga asetnya atau menyimpannya dalam kondisi dimana seperti awal mula pelaksanaan yang ditetapkan (Candy, *et all*, 2000: 3). Menurut Departemen Pekerjaan Umum (2007) pemeliharaan adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa: pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan mendapatkan bantuan dari warga sekitar jaringan irigasi Ponre-ponre. Bentuk pemeliharaan jaringan dilakukan dari hal terkecil misalnya pembersihan jalur irigasi, perbaikan kerusakan dalam skala kecil sedangkan perbaikan skala besar dilakukan dengan mengusulkan rencana perbaikan ke pemerintah pusat.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo (www.media.neliti.com/media/publications. online: diakses tanggal 28 Agustus

2018) dengan judul “Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3r (Reduce, Reuse Dan Recycle) (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Hasil dari penelitian mereka adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan TPST Desa Mulyoagung dibedakan menjadi partisipasi masyarakat dalam bentuk uang/material dan dalam bentuk tenaga/jasa.

Dalam bentuk uang partisipasi masyarakat tidak besar, karena pembangunan TPST sebagian dana banyak diperoleh dari pemerintah sehingga semua pembangunan fisik TPST ditangani oleh pemerintah. bentuk tenaga/jasa sudah baik. Jenis partisipasi yang ada di Desa Mulyoagung jika merujuk pada pendapat Keith Davis yang dikutip oleh Sastropetro (1988, h.16), yaitu dalam bentuk tenaga (physical participation) dimana partisipasi baik individu maupun kelompok dengan tenaga yang dimilikinya melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan maksud tertentu. Hal ini dapat dilihat dari penyajian data fokus bahwa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat juga ikut berpartisipasi baik berupa tenaga/jasa saat pembangunan berlangsung.

Bentuk partisipasi ini jika dikaitkan dengan pembangunan TPST, diwujudkan dalam bentuk sumbangan tenaga kerja yang diberikan oleh masyarakat, warga ikut berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desanya dengan menyumbangkan tenaga mereka. Partisipasi tenaga kerja yang ada di desa di dasari dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa mulyoagung bergotong royong dalam pembuatan jalan menuju TPST. Partisipasi

masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan pembangunan TPST. Dari hasil penelitian, partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam memelihara TPST sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kesukarelaan atau kesadaran masyarakat untuk membayar iuran guna membiayai operasional TPST agar tetap berjalan dengan baik. Karena TPST Desa Mulyoagung merupakan hasil swadaya dari masyarakat maka peran masyarakat dalam membayar iuran sangatlah penting agar TPST tetap bisa berjalan dan berkembang.

Seperti yang dikatan oleh Slamet (1994: 89), partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage) yaitu pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Dalam memanfaatkan TPST juga sangat baik, selain untuk mengelola sampah agar lingkungan menjadi bersih TPST juga dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan yang ada yaitu mengajak atau mempekerjakan masyarakat Desa Mulyoagung yang tergolong ekonomi rendah untuk bekerja di TPST, Sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di Desa Mulyoagung. TPST Mulyoagung Bersatu pada tahun 2013 sudah bisa mempekerjakan sebanyak 64 orang hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2010. Bahkan pekerja TPST tidak Cuma berasal dari Desa Mulyoagung sendiri, 11 diantaranya berasal dari desa lain. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R Pra pengelolaan Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran

serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka.

Dalam pra pengelolaan sampah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan sampahnya sendiri. Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara baik di sumbernya, individual maupun komunal. Ada beberapa tujuan dilakukan pewadahan yaitu untuk memudahkan pengumpulan dan pengangkutan, mengatasi timbulnya bau busuk dan menghindari air hujan. Untuk menunjang keberhasilan operasi pengumpulan sampah, perlu adanya pewadahan yang sebaiknya dilakukan oleh sumber sampah. Pewadahan tersebut ditempatkan sedemikian rupa, sehingga memudahkan dan cepat bagi para petugas untuk mengambilnya secara teratur dan higienis. Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Faizah (2008), dalam pengelolaan menuju zero waste, proses pemilahan dan pengolahan harus dilaksanakan di sumber sampah, baik bersamaan maupun secara berurutan dengan pewadahan sampah. Pengelolaan sampah diawali dari lokasi timbulan sampah atau produsen sampah. Sampah dipisah antara sampah organik dan sampah anorganik, dan ditempatkan pada wadah sampah yang berbeda. Sampah organik untuk diproses menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik biasanya dimanfaatkan untuk didaur ulang maupun

dimanfaatkan kembali. Di Desa Mulyoagung partisipasi masyarakat dalam pewardahan sudah baik.

Dari hasil penelitian di Desa Mulyoagung setiap depan rumah masyarakat terdapat tempat sampah. Masyarakat wewadahi sampah-sampahnya pada kantong kresek dan dibuang pada tempat sampah depan rumahnya. Akan tetapi pewardahan sampah tidak disertai dengan pemilahan. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, selain itu keberadaan tempat sampah yang disediakan di setiap rumah di Desa Mulyoagung hanya disediakan satu tempat sampah, tempat sampah yang disediakan tidak dibedakan antara sampah basah dan sampah kering. Walaupun tanpa pemilahan, dengan ikut berpartisipasi dalam wewadahi sampahnya sendiri itu sudah baik. Sehingga sampah tidak berserakan, masyarakat juga mau membuang sampahnya di tempat sampah.

Proses pengelolaan Dalam proses pengelolaan sampah pada TPST Mulyoagung Bersatu masyarakat disini yaitu masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menjadi pengurus TPST. Kepengurusan TPST terdiri dari ketua RT/RW dan Tokoh Setempat. Menurut Keith Davis sebagaimana yang dikutip Sastropetro (1988: 16), jenis partisipasi masyarakat yang ada di Desa Mulyoagung dalam pengelolaan sampah, berupa tenaga (*physical participation*), yaitu partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan maksud tertentu. Hal ini Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara sukarela mengurus TPST dengan maksud agar tercipta lingkungan yang bersih. KSM juga

melibatkan partisipasi masyarakat lain yaitu untuk bekerja menjadi pengangkut, pemilah dan pengomposan.

Masyarakat yang menjadi pekerja pada TPST ini merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Paska pengelolaan Sama halnya dengan proses pengelolaan sampah, dalam hal pemasaran hasil dari TPST tidak melibatkan banyak masyarakat. Karena sudah ada tim divisi pemasaran dari pihak TPST yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat. Menurut Keith Davis sebagaimana yang dikutip Sastropetro (1988: 16), jenis partisipasi masyarakat yang ada di Desa Mulyoagung dalam pengelolaan sampah, berupa tenaga (*physical participation*), yaitu partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan maksud tertentu. Dalam memanfaatkan hasil olahan dari TPST khususnya pupuk organik sudah baik. Karena pupuk organik diberikan secara gratis untuk masyarakat Desa Mulyoagung. Dengan adanya pemberian pupuk organik gratis diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi hasil pertanian maupun tanaman hias milik warga Desa Mulyoagung.

Dari kedua hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya partisipasi tenaga masyarakat dipengaruhi oleh seberapa besar motivasi yang terdapat dalam diri masyarakat. Jika masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan, maka diharapkan sumbangsih dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan pembangunan tersebut juga besar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai optimalisasi pengelolaan sumber daya air dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat petani di Ponre-ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Operasi Jaringan Irigasi

- a. Sistem kerja pengaturan irigasi telah ditentukan oleh pemerintah.

Pengaliran ke petak-petak sawah dilakukan saat musim tanam tiba khususnya saat musim pancaroba dan krisis air. Pihak dinas telah menunjuk pegawai untuk melakukan buku tutup jaringan irigasi yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas tanam petani apalagi saat musim kemarau tiba. Pengairan dilakukan minimal 2 minggu sekali atau tergantung dari keadaan sawah petani.

- b. rencana tanam telah dilakukan pada awal masa tanam yakni pada awal musim penghujan, pengaturan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kekurangan air di musim kemarau, jenis tanaman yang ditanam pun beragam tergantung dari musim dan keinginan petani.

2. Pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan mendapatkan bantuan dari warga sekitar jaringan irigasi Ponre-ponre. Bentuk pemeliharaan jaringan dilakukan dari hal terkecil misalnya pembersihan jalur irigasi, perbaikan

kerusakan dalam skala kecil sedangkan perbaikan skala besar dilakukan dengan mengusulkan rencana perbaikan ke pemerintah pusat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas mengenai optimalisasi pengelolaan sumber daya air dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat petani di Ponre-ponre Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Bagi para masyarakat

Diharapkan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi secara maksimal, karena dengan menilik kondisi jaringan irigasi saat ini sawah dari musim kemusim semakin berkurang.

2. Bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone

Diharapkan bisa sering turun lapangan melihat kondisi jaringan irigasi di perkampungan agar lebih mengetahui secara jelas bagaimana kondisinya saat ini dan berupaya untuk bisa memperbaikinya.

3. Bagi Semua Lapisan masyarakat

Diharapkan agar dapat terus melestarikan nilai-nilai sosial (gotong-royong) yang sudah menjadi identitas bangsa Indonesia, jangan selalu mengharap upah untuk segala urusan yang menyangkut kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governace Melayani Publik. Yogyakarta : UGM Press.
- Alwi, Syafaruddin. 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan. Kompetitif. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Anonim. 2007. Pengelolaan Laboratorium Fisika Sekolah Menengah Atas. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Asdak, C. 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Azdan, M. Donny. 2008. Perubahan Paradigma Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi. Jakarta: Rienekacipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pekerjaan Umum. 1983. Pedoman Klimatologi. Direktorat Penyelidikan Masalah Air. Departemen Pekerjaan Umum. Bandung.
- Eny Kusdarini. 2011. Dasar – Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Yogyakarta: UNY Press.
- Fandy Tjiptono. 2000. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: Andi Offset.
- H.A.S Moenir. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hakim, Lubis, S. G. Nugroho, M. A. Diha, G. B. Hong, dan H. H. Bailey., 1986. Dasar – Dasar Ilmu Tanah. Penerbit Universitas Lampung. Lampung.
- Handojo, R. 2008. Konsep dan Pengembangan Eco Efficient dalam Pembangunan Infrastruktur. Catatan perkuliahan. Fakultas Teknis Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung.
- Handoko. 1995. Klimatologi Dasar. Pustaka Jaya. Jakarta.

Hardiyabsyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.

Inu Kencana Syafii. 1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Lee, R., 1990. Hidrologi Hutan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Lexy J. Maleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Linsley, R.K, Franzini. Joseph, B.F. Sasongko, Djoko. 1986. Teknik Sumber Daya Air . Jilid 2 edisi ketiga. Erlangga. Jakarta.

Litjan Poltak Sinambela, dkk. 2011. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Lupiyoadi, Hamdani. 2006. Manajemen Pemasaran Jasa, Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Salemba .

Rangkuti, Freddy. 2003. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2006. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Saefullah. 1999. Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sumedang: FISIP UNPAD.

Supranto. 1997. Pengukuran Tingkat kepuasan Pelanggan. Jakarta: Rineka cipta.

Undang-undang

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Internet

Bappenas. (2004). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009. Diperoleh dari www.bappenas.go.id.

Bappenas. (2005). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025. Diperoleh dari www.bappenas.go.id.

BFF (2008). Ecological Footprint. Retrieved October 2008, Diperoleh dari http://www.bestfootforward.com/ecological_footprint

Biopori (2007). Desain dan Konsep Lubang Resapan Biopori. Diperoleh September 2008, dari www.biopori.com

Kakiangsa (2008). Development of Micro Hydro as an Alternative Energy in Remote Area. Diperoleh September 2008, dari www.kakiangsa.wordpress.com

Lapor.com. Krisis air bersih di Kabupaten Bone. Online: diakses tanggal 12 Mei 2018.

Sragen (2008). Infrastruktur Irigasi di Jawa Tengah. Diperoleh September 2008, dari www.sragen.go.id

BOSOWA







PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
UPT PSDA WILAYAH SANREGO

Alamat Jalan A. Page No. Telp. Palattae Kecamatan Kafu Pos. 92767

SURAT KETERANGAN

Nomor : 35 / UM / SRG / IX / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPT PSDA Wilayah Sanrego menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama : RUSTAM
NIM : 4616103030
Universitas : BOSOWA
Program Studi : Administrasi Publik
Keterangan : Telah melaksanakan penelitian

Mahasiswa tersebut benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di kantor UPT PSDA Wilayah Sanrego pada tanggal 7 April dengan judul penelitian:

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM UPAYA
PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE**

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palattae, 17 September 2018

Kepala UPT PSDA

Wilayah Sanrego



NIP. 196912312007011111

LAMPIRAN 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Yth. Responden

- Daftar pertanyaan ini hanyalah untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyelesaian tesis pada Universitas Bosowa Makassar. Oleh sebab itu, dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk memberikan jawaban secara obyektif dan sejujurnya sehingga dapat bermanfaat dalam penelitian ini.
- Kerahasiaan jawaban dan identitas Bapak/Ibu/Sdr(i) selalu dijaga sesuai dengan etika penelitian.

A. Identitas Responden

Nama lengkap :
Umur :
Jenis Kelamin : Pria/Wanita
Pekerjaan :
Pendidikan terakhir :

PERTANYAAN

A. Operasi Jaringan irigasi

1. Menurut bapak/ibu, bagaimanakan bentuk pengoperasian jaringan irigasi saat ini?
2. Menurut bapak/ibu, apakah keuntungan dari pengoperasian jaringan irigasi?
3. Menurut bapak/ibu, siapa pihak yang berwenang dalam pengoperasian jaringan irigasi?
4. Menurut bapak/ibu, apakah keikutsertaan masyarakat memberikan dampak yang positif terhadap pengoperasian jaringan irigasi?
5. Menurut bapak/ibu, bagaimanakah sistem tanam yang diterapkan di Kabupaten Bone?
6. Menurut bapak/ibu, adakah solusi yang tepat untuk meningkatkan hasil tanam petani?

B. Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1. Menurut bapak/ibu, apakah semua kalangan dan lapisan masyarakat ikut serta dalam pengelolaan jaringan irigasi?
2. Menurut bapak/ibu, apakah keikutsertaan masyarakat memberikan dampak yang positif terhadap pengelolaan irigasi?
3. Menurut bapak/ibu, adakah dampak dari partisipasi masyarakat baik pasrtisipasi harta benda maupun tenaga?



Gambar 3 : Wagub SulSel Kunjungan Kerja ke Bedungan Kec.Kahu



Gambar 4 : Babinsa Koramil 02 bersama Kodim 1407 Kodam 14 Hasanuddin



Gambar 1: Program cetak sawah Kementerian Pertanian di Desa Latteko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang berhasil ditanami, Senin (10/12/2018).



Gambar 2: Bendungan Ponre-Ponre Kab.Bone